

**FIKIH KEBANGSAAN:
Telaah Pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang
Kemerdekaan dan Persatuan Indonesia**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:
Miftakhul Arif
NIM. F53416018

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Arif
NIM : F53416018
Program : Doktor (S-3)
Prodi : Dirasah Islamiyah
Institusi : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 10 September 2019
Saya yang menyatakan



Miftakhul Arif

PERSETUJUAN

Disertasi Miftakhul Arif ini telah disetujui
pada tanggal 10 September 2019

Oleh

Promotor,



Prof. Dr. H. M. Ali Haidar, MA.

Promotor,



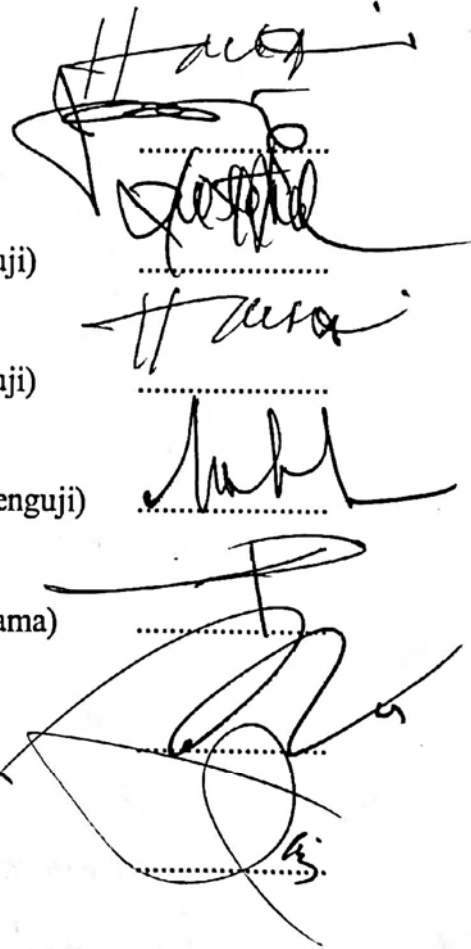
Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin M.Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Miftakhul Arif ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 17 Desember 2019.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. M. Ali Haidar, MA. (Promotor/Penguji)
4. Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag. (Promotor/Penguji)
5. Prof. H. Kacung Marijan, MA, Ph.D. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag. (Penguji)
7. Prof. H. Achmad Jainuri, MA, Ph.D. (Penguji)



Surabaya, 10 Januari 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Arif
NIM : F53416018
Fakultas/Jurusan : S3-Dirosah Islamiyah
E-mail address : elmaarief18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah Disertasi yang berjudul :

Fikih Kebangsaan : Telaah Pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang Kemerdekaan dan Persatuan Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Desember 2020

Penulis

Miftakhul Arif ✕

didirikanlah NU tahun 1926. Hubungan antar kedua faksi tersebut baru mulai membaik di akhir tahun 1930-an dengan berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), di mana Kiai Wahab juga menjadi salah seorang pendirinya. Pada masa penjajahan Jepang, MIAI berubah nama menjadi Masyumi. Kiai Wahab melalui Masyumi berjasa mempersenjatai santri dan umat Islam dengan membentuk korps militer bernama laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin yang telah mendapatkan pelatihan militer di Cibarusa, Bogor.

Di era kemerdekaan, khususnya selama kepemimpinan rezim orde lama (Orla), masalah utama yang dihadapi adalah keamanan negara serta pemulihan stabilitas nasional. Selain menghadapi agresi militer Belanda, Orla juga dihadapkan pada konflik ideologis yang berpotensi menyebabkan perpecahan nasional, bahkan mengarah pada tindakan makar. Itu terlihat, misalnya, pada saat Sidang Konstituante (1957-1959) merumuskan dasar negara. Persidangan berjalan alot akibat perdebatan sengit antara kubu Islam (Kiai Wahab masuk dalam faksi ini) versus kubu komunis. Kubu Islam menghendaki agar negara berdasarkan Islam (dengan memasukkan rumusan Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD 1945) sedangkan pihak komunis menghendaki sebaliknya, negara sekuler netral agama.¹⁰

¹⁰ Problem menyangkut relasi Islam dan negara ini sesungguhnya tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga mayoritas negara berpenduduk muslim di dunia seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, dan Aljazair, pasca negara-negara tersebut terbebas dari kolonialisme Barat. Sepanjang menyangkut relasi agama-negara, para pakar umumnya memetakannya ke dalam tiga tipologi, yaitu Sekulerisme Islam, Formalisme Islam, dan Subtansialisme Islam. Penganut paradigma formalisme Islam mengendaki Islam sebagai dasar negara, bukan Pancasila. Menurut mereka, "Pancasila adalah buatan manusia, sementara Islam adalah ciptaan Tuhan yang tidak mungkin salah. Mempertahankan paham negara Pancasila, tak ubahnya dengan mempertahankan kesyirikan dan kekaifiran, sehingga berkah tidak akan datang untuk bangsa ini". Kebalikan dari pertama, paradigma sekuler mengidealkan negara netral agama. Baik negara ataupun agama [Islam], masing-masing memiliki wilayah garapan sendiri, tidak boleh dicampuradukkan. "Akan terjadi distorsi ketika negara mengurus agama. Sementara ketika agama mengurus negara juga akan terjadi distorsi fungsi-fungsi sehingga tidak jalan. Oleh sebab itu, pisahkan saja antara agama dan politik.

partai berlambang palu arit ini terlarang di Indonesia, melainkan juga menyebabkan jatuhnya rezim Orla dan naiknya rezim orde baru (Orba) Soeharto.

Sebagai ulama nasionalis yang aktif bergulat di dunia politik baik sebelum atau sesudah merdeka, tentu tantangan-tantangan di atas menjadi bagian dari tugas keagamaan dan kenegaraan yang harus diselesaikan oleh Kiai Wahab. Dalam menunaikan tugas tersebut ia tidak sendirian. Ia mengorganisir sejumlah ulama dan tokoh-tokoh pesantren dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini mengidentifikasikan diri sebagai pengikut paham keagamaan Aswaja dengan pola bermazhab dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Di bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu al-Ḥasan al-Ash‘ari dan Abu Manṣūr al-Māturidi, di bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat: Ḥanafi, Māliki, Shāfi‘i, dan Ḥanbali, dan di bidang akhlak-tasawuf mengikuti Imam al-Ghazālī dan Junaid al-Baghdādī. Hal ini berimplikasi pada semua aktivitas duniawi, termasuk urusan politik harus didekati secara keagamaan, khususnya fikih, dan bukan hanya berdasarkan kalkulasi politik untung-rugi. Sebab itu, sudah menjadi tradisi di kalangan ulama NU bahwa setiap keputusan politik yang akan diambil harus dicari atau diketahui dulu jawaban hukumnya (fikih) dengan menggelar, misalnya, forum *baḥt al-masā’il* (diskusi hukum Islam) yang melibatkan banyak tokoh pesantren ahli agama (kiai).

Kiai Wahab jauh sebelum melibatkan diri dengan urusan politik dan kebangsaan sudah terlatih dan terampil memecahkan persoalan-persoalan fikih. Saat menimba ilmu di Pesantren Tebuireng asuhan KH. M. Hasyim Asy‘ari, misalnya, Kiai Wahab tercatat sebagai peserta aktif kelas musyawarah. Kegiatan

		kesulitan melakukan uji validasi atas kebenaran sajian informasi.
2	Abdul Halim, <i>Sejarah Perjuangan Kiai Abdul Wahab Chasbullah</i> , 1970.	Sebagaimana judulnya, karya Halim ini menguraikan sejarah hidup dan perjuangan Kiai Wahab. Dinarasikan dalam bentuk prosa beraksara <i>pegon</i> dan berbahasa Melayu. Kelebihan karya ini terletak pada penyusunnya, Kiai Abdul Halim. Ia adalah murid sekaligus mitra berjuang Kiai Wahab sejak sebelum mendirikan NU. Karenanya, informasi yang disajikan memiliki bobot akademik tinggi. Terlebih karya tersebut sempat diperiksakan langsung ke Kiai Wahab sebelum akhirnya dicetak.
3	Saifudin Zuhri, <i>KH. Abdul Wahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama</i> , 1972.	Buku karya Zuhri ini menarasikan biografi Kiai Wahab, khususnya kiprahnya di bidang keorganisasian dan politik. Pendekatan yang digunakan adalah sejarah. Kelebihan buku Zuhri ini terletak pada bobot informasi yang disajikan. Sebab, ditulis langsung oleh Saifuddin Zuhri yang dikenal memiliki kedekatan langsung dengan Kiai Wahab.
4	Saifullah Ma'shum (ed.), <i>KH. Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri, dan Penggerak NU</i> , 1999.	Mengulas riwayat hidup Kiai Wahab. Pendekatan yang digunakan adalah sejarah. Karya ini banyak merepitisi informasi lama khususnya dari karya biografi yang ditulis oleh Aboebakar Atjeh dan Zuhri, ketimbang menyajikan informasi baru.
5	Muhammad Rifai, <i>KH. Wahab Hasbullah: Biografi Singkat 1888-1971</i> , 2010.	Karya Rifai menggunakan pendekatan sejarah untuk menyajikan informasi tentang riwayat hidup Kiai Wahab. Ditulis secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk menyelami sosok Kiai Wahab beserta jejak perjuangannya. Hanya saja sebagai karya akademis, sumber data yang digunakan seluruhnya adalah sekunder dan sekedar

		merepitisi ulang informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya.
6	Choirul Anam , <i>KH. Abdul Wahab Chasbullah: Hidup dan Perjuangannya</i> , 2015.	Meski tergolong karya baru, karya Choirul Anam ini lebih memiliki bobot akademis dibanding karya-karya sebelumnya yang ditulis oleh Ma'shum dan Rifai. Sumber penulisan selain merujuk pada karya biografi awal yang ditulis oleh Halim dan Zuhri, juga menggunakan dokumen-dokumen historis berupa arsip sejarah. Informasi yang disajikan oleh Anam banyak merepitisi dari karyanya yang lain tentang sejarah NU. Jadi, seolah ada kesan bahwa membaca biografi Kiai Wahab adalah sama halnya dengan membaca sejarah kelahiran dan perkembangan NU. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan.
7	Greg Fealy, <i>Wahab Chasbullah: Traditionalism and The Political Development of Nahdlatul Ulama</i> (telah diterjemahkan dengan judul: <i>Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU</i>), 2010.	Pendekatan politik digunakan oleh Fealy untuk melihat figur Kiai Wahab sebagai seorang politisi serta pengaruhnya bagi konstelasi politik tanah air pada masanya. Risetnya ini kaya data, tidak hanya menggunakan sumber tertulis tetapi juga lisan dengan mewawancarai beberapa tokoh yang menjadi saksi hidup atas kebesaran nama Kiai Wahab. Sayangnya ada beberapa data penting yang belum sampai ke tangan Fealy sehingga beberapa informasi tentang Kiai Wahab di dalamnya perlu ditinjau ulang semisal angka tahun kelahiran.
8	Ubaidillah Sadewa, <i>KH. Abdul Wahab Chasbullah: dari Pesantren untuk Indonesia</i> , 2014.	Karya Sadewa ini lebih tepatnya adalah ringkasan atas riwayat hidup yang telah ditulis oleh para pendahulunya seperti Aboebakar Atjeh dan Saifuddin Zuhri. Tidak banyak informasi baru tentang Kiai Wahab yang bisa diperoleh dari buku

Sebelum NU berdiri, Kiai Wahab terlebih dahulu mendirikan Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatut Tujjar. Berdirinya tiga institusi ini, menurut Masfiah, merefleksikan pemikiran Kiai Wahab dalam membidani lahirnya organisasi NU.

Selain riset-riset di atas, juga terdapat beberapa riset lainnya dengan bobot akademis setingkat sarjana strata satu (S1). Kebanyakan dari riset skripsi itu hanyalah repetisi dari bahasan-bahasan yang telah ada sebelumnya, baik berkaitan dengan kiprah organisasi Kiai Wahab, pemikiran politiknya, serta beberapa topik lainnya.⁵⁷

Setelah memaparkan beberapa riset terdahulu, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki aspek kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kesamaannya adalah dari segi subjek kajian, sama-sama mengkaji ketokohan KH. Abdul Wahab Chasbullah. Perbedaannya adalah dari segi fokus kajian dan pendekatan. Riset sebelumnya memiliki fokus kajian seputar riwayat hidup, pemikiran politik, kebangsaan, dan kenegaraan, pemikiran pengembangan organisasi, serta pemikiran dakwah Islam yang kebanyakan menggunakan pendekatan historis (sejarah) dan politik. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran kebangsaan Kiai Wahab tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia dengan menggunakan pendekatan fikih dan sosiologi pengetahuan. Peta

⁵⁷ Lihat misalnya: Iis Suprayitna, *Pergulatan Politik KH. Abd. Wahab Hasbullah: Studi Analisa terhadap NU dan Negara* (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006). Hartono, *Kontribusi KH. Wahab Hasbullah dalam Berorganisasi* (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). Ani Lestari, *Pemikiran KH. Abdul Wahab Hasbullah tentang Dakwah Islamiyah* (Skripsi-- IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015). Arina Wulandari, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Pemikiran dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926)* (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

memudahkan proses perujukan. Sumber lisan tersebut dibutuhkan sebagai penguat, pelengkap, dan konfirmasi atas kebenaran informasi lainnya.

Riset ini menempatkan teks atau wujud simbolik lainnya yang dapat direkam, didokumentasikan, disimpan, dan dianalisis, sebagai objek kajian.⁶⁰ Oleh sebab itu, metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*, yaitu “*the intellectual process of categorizing qualitative textual data into clusters of similiar entities, or conceptual categories, to identify consistent patterns and relationship between variables or themes*”.⁶¹ Dengan teknik ini, peneliti dituntut untuk menemukan, mengidentifikasi dan mengelompokkan data teks ke dalam kluster-kluster berdasarkan kesamaan karakteristik pesan. Data teks tersebut adalah artefak komunikasi sosial, baik berupa dokumen, transkrip komunikasi verbal, atau wujud simbolik lainnya.⁶² Dengan cara ini, pesan *manifest (manifest content)* dari suatu komunikasi dapat ditemukan. Sedangkan untuk menangkap pesan *latent (latent content)*, atau makna di balik teks, seorang peneliti pada tahap berikutnya harus melakukan interpretasi dan eksplanasi.⁶³ Atas dasar itu, analisis hermeneutik juga digunakan dalam riset ini.

⁶⁰ Riset kualitatif memiliki banyak metode dan pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan interpretatif (*interpretative approach*). Pendekatan ini menempatkan perilaku sosial dan aktivitas manusia sebagai teks. Singkat kata, aktivitas manusia dilihat sebagai kumpulan simbol-simbol yang mengekspresikan beragam lapisan makna. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud menemukan pemahaman praktis atas makna dari perilaku sosial. *Content analysis*, sebagaimana digunakan dalam riset ini, adalah salah satu tipe analisis dengan model pendekatan interpretatif ini. Lihat: Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences* (Boston: A Pearson Education Company, 2001), 239.

⁶¹ Lisa M. Given, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, entri “Content Analysis” (California: SAGE Publications, 2008), 120.

⁶² Berg, *Qualitative Research Methods*, 240.

⁶³ A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Merancang Proposal* (t.tp.: Pustaka Mas, 2011), 120.

dalam tradisi pesantren dan juga pernah aktif di salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Selain itu, keseharian peneliti yang mengabdikan diri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, pesantren yang pernah diasuh Kiai Wahab, menyebabkan peneliti memiliki kedekatan emosional dengan keluarga besar Kiai Wahab. Hal ini tentu sangat membantu peneliti dalam menilai kualitas informasi mengenai Kiai Wahab, sekaligus menginterpretasikan data tentangnya. Namun, peneliti menyadari bahwa kedekatan emosional ini tentu berpotensi mereduksi obyektivitas penulis sebagai seorang peneliti. Untuk mengantisipasi hal itu, di samping berusaha memperoleh informasi yang berimbang melalui teknik triangulasi, koreksi dan masukan teman sejawat juga akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil akhir penelitian ini diharapkan benar-benar obyektif.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini diorganisasikan ke dalam beberapa bab, diawali pendahuluan di bab pertama, berisi tinjauan umum tentang masalah penelitian yang hendak dikaji dan juga kerangka metodologis yang akan memandu peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Dilanjutkan bab kedua yang akan memaparkan perjalanan hidup (biografi) Kiai Wahab Chasbullah. Sebagai riset sosio-historis, bab ini berfungsi menelusuri kaitan antara pemikiran Kiai Wahab dengan *setting* sosial kehidupannya. Oleh sebab itu, di bagian ini akan disajikan uraian memadai tentang latar belakang keluarga, riwayat akademik (pendidikan), karir sosial-politik, serta akhir hayatnya hingga memperoleh gelar

pahlawan nasional. Konteks sosial berkenaan dengan waktu, tempat, dan kejadian penting yang melatari pemikiran kebangsaan Kiai Wahab juga akan diuraikan di bab ini.

Bab tiga, empat, dan lima adalah bagian inti dari riset ini. Masing-masing memuat uraian tentang jawaban atas rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Oleh sebab itu, masing-masing bab secara berurutan menguraikan tentang konsep fikih kebangsaan Kiai Wahab, pemikiran fikih Kiai Wahab tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia, dan metodologi yang digunakan Kiai Wahab dalam mengkonseptualisasikan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Kesimpulan dan temuan dari studi ini akan disajikan pada bab enam. Bab ini berisi ulasan singkat yang akan merangkum bahasan-bahasan sebelumnya, implikasi teoretis kajian, serta saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang dianggap relevan dengan topik kajian.

sikap inklusif atas ragam perbedaan yang ada kepada para santrinya. Terbukti antara lain setiap akhir tahun para santri dibiarkan menyelenggarakan pentas seni yang diminati sendiri, dan dipentaskan santri sendiri. Untuk itu, beberapa bulan sebelum acara para santri dengan rombongan masing-masing ada yang belajar ludruk ke Jombang, belajar Jatilan ke Tulungagung, belajar Ketropak ke Madiun, belajar wayang ke Solo, dan sebagainya. Kiai Wahab muda adalah salah satu di antara mereka. Pendidikan keagamaan di pesantren tersebut juga sangat terbuka. Para santri dipersilahkan memakai mazhab pemikiran yang disukai, juga diajarkan memecahkan berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan secara lebih luwes dan toleran. Tak heran, bila Kiai Wahab dinilai jauh lebih longgar dan akomodatif dalam berfikir di banding teman-teman seangkatannya yang lain.⁹⁴ Di pesantren ini, Kiai Wahab menetap selama 4 tahun.

Dari Mojosari, Kiai Wahab melanjutkan perantauannya ke Pesantren Cepaka, Nganjuk. Namun tidak lama, hanya berselang selama 6 bulan. Mungkin karena pesantren ini tidak memiliki kiai yang tinggi pengetahuannya setelah meninggalnya pimpinan pesantren yang sangat masyhur pada akhir abad ke 19. Ia pun memutuskan pindah ke Pesantren Tawangsari, Sepanjang-Sidoarjo, asuhan Kiai Mas Ali dan Kiai Mas Abdullah yang masih saudara ibu kandungnya sendiri. Di pesantren ini, Kiai Wahab kembali mengasah wawasan fikihnya dengan mengkaji kitab *al-Iqnā'* kepada Kiai Mas Ali dan tajwid kepada Kiai Mas Abdullah. Merasa telah memiliki bekal pengetahuan agama yang cukup, Kiai Wahab Chasbullah

⁹⁴ Abdul Mun'im DZ, "Kiai Pemikir dan Penggerak", dalam Abdul Wahab Chasbullah, *Kaidah Berpolitik dan Bernegara* (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 20015), 1xi-1xii.

direbutnya Makah oleh pemimpin Wahabi, Abdul Aziz bin Saud. Dua Kongres Islam Dunia dijadwalkan untuk membahas isu-isu tersebut. Kongres pertama di Kairo yang rencananya digelar pada 1925 sementara kongres kedua di Makah di tahun berikutnya, 1926. Pada Kongres al-Islam III yang diadakan di Surabaya pada Desember 1924, Kiai Wahab dipilih sebagai wakil kalangan tradisional dari tiga delegasi lainnya untuk mewakili Indonesia dalam Kongres Khilafah di Kairo.¹⁴⁵ Akan tetapi, pendelegasian itu urung karena Kongres Kairo sendiri diundur penyelenggaraannya. Rancangan untuk kongres dunia kedua di Makah menimbulkan perpecahan. Saat kelompok tradisional khawatir atas rencana rezim Ibnu Saud yang akan melakukan pembatasan atas praktik-praktik keagamaan tradisional di Hijaz, justeru kelompok modernis menyambutnya dengan penuh sukacita. Puncak konflik antara tradisional-modernis ini tak terhindarkan saat nama Kiai Wahab dicoret dari susunan utusan kongres di Makah, pun usulannya untuk benar-benar mendesak Ibnu Saud agar memberlakukan kebebasan bermazhab untuk semua muslim di Makah tidak diakomodir.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Tiga orang yang ditunjuk sebagai delegasi menghadiri Kongres al-Islam di Mesir itu adalah Raden Mas Soerjopranoto (Komisaris Perhimpunan Central SI Yogyakarta), Haji Fachroeddin (Vice President Hoofdbestuur Perserikatan Muhammadiyah, Yogyakarta), dan KH. Abdul Wahab Chasbullah (Presiden Perserikatan Ta'mirul Masajid, Surabaya). Tiga orang delegasi tersebut bertugas menyampaikan aspirasi dan pemikiran umat Islam Indonesia terkait institusi khilafah yang oleh mereka masih dianggap penting meski hanya sebatas simbol. Buktinya adalah peserta Kongres al-Islam di Surabaya, selain sepakat menunjuk 3 orang delegasi tersebut, juga menyepakati pembentukan Komite Khilafat tingkat pusat di Surabaya dan sub-Komite Khilafat di daerah-daerah. Dalam struktur kepemimpinan Komite Khilafat tingkat pusat, Kiai Wahab diposisikan sebagai sekretaris, sedangkan posisi ketua diduduki oleh Wondosoedirjo. Ibid., 170-174.

¹⁴⁶ Berbeda dengan keputusan kongres sebelumnya yang mengakomodir kepentingan golongan tradisional dan modernis, kali ini yang ditunjuk sebagai utusan ke Makah murni dari eksponen modernis: Tjokroaminoto menggantikan Suryopranoto (SI) dan Mas Mansur menggantikan Haji Fachroeddin (Muhammadiyah). Jatah untuk golongan tradisional sama sekali tidak diberikan. Wajar apabila Wahab Chasbullah sebagai eksponen utama golongan tradisional merasa keberatan. Ia pun tidak tinggal diam. Berbagai pendekatan ia lakukan, misalnya dengan mengajukan usulan-usulan tertulis agar dibawa oleh para utusan ke Makah dan disampaikan kepada penguasa negeri Arabia, berhubung ketidakhadirannya pada Kongres di Bandung karena bersamaan dengan wafatnya

	Kebangsaan, Ekonomi, Politik, dan lainnya.		Ekonomi, dan Sosial-Politik
5	<i>Katerangan 'Ilmu 'Aqaid ingdalem Islam</i> (karya ini tidak sampai tuntas)	Dimuat di Swara NU, Surabaya, tahun 1350 H.	Teologi
6	<i>Katerangan 'Ilmu Fiqih ingdalem Agami Islam</i> (karya ini tidak sampai tuntas)	Dimuat di Swara NU, Surabaya, tahun 1350 H.	Fiqih
7	<i>Kitab Uşţul</i>	Tidak diterbitkan	Kemaritiman
8	<i>Kaidah Berpolitik dan Bernegara</i> (dikumpulkan dan disunting oleh Abdul Mun'im DZ)	Langgar Swadaya, Depok, 2004.	Sosial-Politik

Salah satu karyanya adalah *Panyirep Gemuruh*, atau *Penyerap Gemuruh* menurut versi lain. Karya perdananya ini tersembunyi puluhan tahun lamanya hingga salah satu naskah salinannya ditemukan pada 10 September 2017 oleh Komunitas Pegon, Banyuwangi. Ayung Notonegoro, selaku pendiri Komunitas Pegon, dalam eksplorasinya menjelaskan bahwa kitab yang ditulis dalam aksara Pegon dengan bahasa campuran Jawa dan Arab ini dengan jelas menyebut nama KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai penulisnya. “*Iki kitab Panyirep Gemuruh karangan Kiai Haji Abdul Wahab Kertopaten Surabaya bin Kiai Chasbullah Tambakberas Jombang bin Kiai Haji Said bin Syamsudin*” (ini kitab Panyirep Gemuruh karya KH. Abdul Wahab Kertopaten Surabaya bin Kiai Chasbullah

Wahab dalam dunia persilatan (bela diri), juga profesinya sebagai agen biro travel perjalanan haji yang pulang pergi Indonesia-Saudi dengan naik kapal mengarungi samudera, di samping negara Indonesia sendiri dikenal luas sebagai negara maritim dengan hamparan laut yang sangat luas. Satu-satunya bocoran informasi tentang isi kitab adalah fatwanya tentang kebolehan belajar bahasa asing (Belanda) sebagai sarana dakwah, komunikasi antar bangsa, dan terhindar dari tipu daya asing. Bahasan tersebut, menurut pengakuan Kiai Wahab, dikupasnya secara panjang dalam *Kitab Uṣṭūl*. Jadi, kitab tersebut bisa jadi adalah refleksi dari perjalanan hidup Kiai Wahab, khususnya selama berbulan-bulan berada di atas kapal, mengarungi luasnya samudera, dan berinteraksi dengan banyak warga dunia.

Ada satu lagi karya Kiai Wahab, berjudul *Kaidah Berpolitik dan Bernegara*. Buku ini berisi kumpulan pidato Kiai Wahab dalam berbagai even serta cuplikan berbagai pernyataannya yang termuat di berbagai sumber. Kumpulan pidato dan cuplikan yang awalnya berserakan itu selanjutnya disunting, dikompilasi, dan dibukukan oleh Abdul Mun'im DZ, seorang pegiat sejarah NU, lalu diterbitkan dengan nama pengarang KH. Abdul Wahab Chasbullah. Usaha Abdul Mun'im DZ ini tentu patut diapresiasi dan patut menjadi inspirasi untuk usaha lanjutan dalam menyelamatkan karya-karya intelektual Kiai Wahab lainnya yang masih berserakan di sana sini.

Rentang waktu antara tahun 1630-1800 adalah fase di mana kaum imperialis Belanda disibukkan oleh perjuangan memperkuat dan memperluas hegemoninya atas wilayah jajahan Indonesia. Dengan berbagai taktik dan siasat, VOC berupaya maksimal menyingkirkan para pesaingnya dengan menguasai lalu lintas perniagaan di hampir seluruh wilayah Indonesia, memonopoli perdagangan, serta merebut kekuasaan politik para sultan --raja-raja pribumi. Melalui perjanjian *Korte Verklaring*, para sultan atau raja dipaksa menyerahkan kedaulatannya ke VOC dan selanjutnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Para sultan dibenarkan tetap menyanggah gelar sultan, tetapi dihapuskan kekuasaan politik, ekonomi, dan militernya. Di lain pihak, runtuhnya imperialis Katolik Barat atau imperialisme kuno, 1870 M, membawa dampak baik bagi perkembangan imperialisme Belanda di Indonesia. Setelah berhasil mendeligitimasi kekuasaan para sultan, pemerintah kolonial Belanda sebagai salah satu kekuatan imperialisme modern segera meneguhkan diri sebagai kekuatan ekonomi dan politik serta mendirikan negara jajahan di Indonesia.²⁰⁰

Hal di atas menimbulkan dua efek ganda sekaligus bagi bangsa Indonesia: alineasi politik dan kemerosotan ekonomi yang semakin buruk.²⁰¹ Pasca runtuhnya kedaulatan para sultan, kekuasaan politik secara *de facto* dipegang oleh pemerintah kolonial. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, mereka menggunakan sistem pemerintahan tak langsung. Yaitu dengan mempertahankan struktur feodal masyarakat Indonesia di mana bupati hingga struktur di bawahnya --yang terdiri

²⁰⁰ Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid 2, xv, xxi. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 135-dst.

²⁰¹ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Sidoarjo: Al-Maktabah, cet. IV, 2011), 42.

pemikiran, Muhammad bin Abdul Wahab menghidupkan kembali ajaran Hashawiyah yang pernah diusung Ibn Taimiyah (1263-1328 M) dengan beberapa penambahan. Hashawiyah adalah kelompok yang tekstualis dalam memahami *naʿs* agama, al-Qur'an-hadis, tanpa menghiraukan pertimbangan dalil akal.²²¹ Muhammad bin Abdul Wahab bersama pengikut fanatiknya, kaum Wahabi, mengusung misi purifikasi agama: membersihkan Islam dari unsur-unsur di luar Islam (*bid'ah*) di segala aspeknya (tauhid, fikih, dan akhlak). Mereka mempropogandakan seruan kembali pada al-Qur'an dan hadis serta mencela taklid (mengikuti pendapat seorang imam *mujtahid*) dan bermazhab. Berbagai praktik keagamaan yang telah mapan dan mengakar kuat di kalangan umat Islam seperti *tawassul*, *tabarruk*, dan ziarah ke makam Rasulullah dan makam orang-orang salih divonis syirik. Tak hanya itu, praktik keagamaan yang tidak secara eksplisit disebut dalam al-Qur'an-hadis ditolakny dan dikategorikan sebagai *bid'ah ḍalālāh* (inovasi agama yang sesat).

Sebab, setiap tokoh besar yang menggulirkan gerakan pembaruan yang penting dalam sejarah Islam merupakan seorang penulis yang berpengaruh dan produktif. Dibanding Syah Waliyullah Dihlawi, tokoh pembaruan Islam asal India yang relatif berdekatan dengan periodenya, --misalnya-- tentu Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada apa-apanya. Hamid Algar, *Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, terj. Rudy Harisah Alam (Jakarta: Paramadina, 2008), 46-49.

²²¹ Kaitannya dengan relasi *shara'* (wahyu) dan akal, ada perbedaan mendasar antara tiga sekte Islam: Sunni, Mu'taziah, dan Hashwiyah. Kelompok Sunni mendudukan *shara'* dan akal secara harmonis. Mereka, misalnya, mentakwil ayat-ayat *mutashabihāt* (memiliki lebih dari satu kemungkinan penafsiran) yang makna literalnya bertentangan dengan akal, diselaraskan agar tidak bertentangan dengan akal. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka berhukum dengan akal sekalipun tak selaras dengan *shara'*. Akal didahulukan, baru kemudian *shara'*. Kebalikan dari Hashwiyah, di mana kelompok terakhir ini berpegang pada makna literal teks *shara'* meskipun bertentangan dengan dalil akal. Tiga sekte di atas sesungguhnya merepresentasikan tiga macam paradigma penafsiran di dunia Islam saat ini: moderatisme Sunni, liberalisme Mu'tazilah, dan literalisme Hashwiyah. Dalam konteks ini, Kiai Muhammad Faqih, Maskumambang Gresik, menempatkan Muhammad bin Abdul Wahab pada tipologi terakhir, literalisme Hashwiyah. Muhammad Faqih Maskumambang, *al-Nusus al-Islamiyah fi al-Radd 'ala Madhhab al-Wahhabiyyah*, disunting Abdul Aziz Masyhuri (Depok: Sahifa, 2015), 14.

Kaum Wahabi juga menolak takwil atas ayat-ayat *mutashābihat* yang berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan seperti *istawā, yad, wajh*, dan lain-lain. Mereka terperangkap pada akidah antropomorfis *tajsīm* (meragakan wujud Tuhan) dan *tashbīh* (menyerupakan Tuhan dengan makhluk). Di atas itu semua, mereka berkeyakinan bahwa setiap muslim di luar kelompoknya adalah sesat, kafir, halal darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Atas dasar itu, mereka melakukan pembantaian secara membabi buta terhadap umat Islam di beberapa daerah karena tuduhan murtad.²²² Aksi keji itu semakin meyakinkan ulama Aswaja bahwa kaum Wahabi adalah reinkarnasi dari kelompok Khawarij yang dikenal berpaham radikal. Tak hanya itu, banyak analis meyakini bahwa wahabisme adalah faktor utama merebahnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme berskala global dewasa ini.²²³

²²² Lihat: Ahmad bin Zaini Daḥlān, *Fitnat al-Wahhābiyah* (Istanbul: Isik Kitabevi, 1978). Faḥī al-Azhari al-Miṣri, *Adillah wa Wathāiq Faḍāih al-Wahhābiyah* (t.tp.: t.p., 2015). Kiai Fadhal, Senori Tuban, mengidentifikasi ada sepuluh kesesatan ajaran Wahabi. [1] menetapkan wajah, tangan, dan arah pada Tuhan; [2] menafikan peran akal dalam masalah keagamaan [3] mengingkari adanya *ijmā'* [4] menafikan peran dan kedudukan *qiyās* [5] melarang taklid kepada para imam *mujtahid* dan menganggapnya sebagai perbuatan kufur dan syirik [6] mengkafirkan setiap muslim yang tak sepaham dengan mereka [7] melarang *tawassul* kepada Allah melalui Nabi, wali, dan orang-orang salih [8] mengharamkan berziarah ke makam para Nabi dan orang-orang salih [9] mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah; dan [10] mengkafirkan orang yang bernazar pada selain Allah. Abi al-Faḍal al-Senori al-Tubāni, *Maḥmūm Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah min Kitāb al-Durr al-Farīd fī Sharḥ Jauharat al-Tauhid* (t.tp.: t.p., t.t.), 7.

²²³ Lihat: Michael R. Dillon, *Wahhabism: Is it a Factor The Spread of Global Terrorism?* (California: Tesis Master Naval Postgraduate School, 2009). Daniel Ungureanu, "Wahhabisme, Salafisme, and The Expansion of Islamict Fundamentalist Ideology", 141-146. Terkait ekstremisme Wahabi, menarik menyimak kritikan pedas seorang analis Saudi yang juga guru besar King Abdul Aziz University, Jeddah, Abdullah Muhammad Sindi: "Wahhabism is violent, right wing, ultraconservative, rigid, extremist, reactionary, sexist, and intolerant. Its bloody historical records is well documented and cannot be erased or dismissed by anyone. All of Wahhabism's recent cosmetic changes to improve its own image would never deceive most educated Arabs and Muslims (Paham Wahabi itu bengis, sayap kanan [radikal], ultrakonservatif, kaku, ekstrem, reaksioner, terlalu menyoroti perbedaan gender [sexist], dan intoleran. Rekam sejarah berdarah Wahabi terdokumentasikan dengan baik dan tak dapat dihapus dan dimusnahkan oleh siapapun. Semua perubahan tampilan Wahabisme baru-baru ini untuk meningkatkan citranya tidak akan pernah memperdaya sebagian besar orang Arab dan muslim). Abdullah Muhammad Sindi, "Britain and Rise of Wahhabism and The House of Saud", *Kana'an Bulletin*, Vol. IV, No. 361 (16 Januari 2004), 8.

memproteksi Islam (*hifz al-dīn*) dari orang-orang yang berniat menghancurkan atau menghalang-halangi dakwah Islam, juga dalam rangka memproteksi keselamatan bangsa dan negara dari para musuh (*sadd al-'udwān*) yang berniat menjajah dan merampas tanah air umat Islam secara paksa (zalim).²⁶⁹

Cinta tanah air dengan demikian adalah *sabab* (sebab), sedangkan usaha serius dalam meraih kemerdekaan beragama (menjalankan kewajiban Islam), berbangsa, dan bernegara adalah *musabbab* (akibat atau hasil yang diharapkan). Kaidah usul yang juga sering dikutip Kiai Wahab mengatakan *al-asbāb fī ḥukm al-musabbab wa al-umūr bi maqāṣidihā* (status hukum sebab mengikuti status hukum akibat dan segala sesuatu bergantung pada motif perbuatannya).²⁷⁰ Sebab yang mengantar pada kemaslahatan adalah maslahat. Sebaliknya, sebab yang mengantar pada

individu (muslim) secara khusus, melainkan kepada siapapun asalkan kepentingan umum itu terlaksana. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Sharḥ al-Kaukab al-Sāṭi' Naẓm Jam' al-Jawāmi'*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Salām, 2008), 111. Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtājīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 307.

²⁶⁹ 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), 82-83. Waṣfī 'Ashūr Abū Zaid, *al-Jihād fī Sabīlillāh: Maqāṣid wa Athār*, http://cp.alukah.net/Books/Files/Book_7364/BookFile/Jihad.pdf, 9.

²⁷⁰ Secara bahasa *sabab* berarti tali, yakni sesuatu yang menghubungkan pada yang lain. Adapun menurut istilah *sabab* berarti sesuatu yang dijadikan sandaran hukum (*mā yudaf al-ḥukmu ilahi*). Dengan ungkapan lain, *sabab* adalah alasan logis yang melatari dan mendasari ditetapkannya hukum. Keberadaannya menyebabkan adanya hukum dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Contoh: zina adalah sebab wajibnya hukuman cambuk, condongnya matahari ke arah barat (*al-zawāl*) adalah sebab masuknya waktu duhur, mabuk adalah sebab keharaman *khamr*, bepergian jauh adalah sebab kebolehan meng-*qaṣr* salat, dan lain-lain. Sebagian ahli memasukkan *illat* (alasan hukum) dalam pengertian *sabab*. Teori kausalitas (*sabab-musabbab*) ini berkait erat dengan operasionalisasi teori maslahat-mafsadat. Karenanya, al-Shāṭibi memberikan uraian panjang (terorganisir dalam 10 topik bahasan) tentang penggunaan teori kausalitas ini. Salah satunya adalah kaidah berbunyi: *إِتْقَاعُ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ إِتْقَاعِ الْمُسَبَّبِ* (memposisikan *sabab* pada posisi *musabbab*). Kaidah ini semakna dengan kaidah *السَّبَبُ فِي حُكْمِ الْمُسَبَّبِ* (legalitas *sabab* mengikuti legalitas *musabbab*) yang cukup sering dikutip Kiai Wahab. Kaidah ini digunakan dalam konteks di mana *sabab* menurut hukum kebiasaan yang berlaku berakibat pada tercapainya *musabbab*. Seperti makan adalah sebab timbulnya kenyang, belajar adalah sebab bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Uraian rinci, baca: Shams al-Dīn bin Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalli, *Sharḥ al-Jalāl 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'*, Vol 1 (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 94. Abū Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Sharī'ah*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 127.

Darul Islam (DI)-nya di Jawa Barat selama 1948-1962, dan beberapa pemberontakan lain yang terjadi di wilayah Sumatera oleh Dewan Banteng, Dewan Gajah, Permesta, dan PRRI yang melibatkan beberapa petinggi Angkatan Darat, 1956-1957.³⁰³ Belum lagi konflik Indonesia-Belanda dalam memperebutkan Irian Barat selama 1950-1962.

Tentu menghadapi itu semua dibutuhkan semangat, motivasi, serta totalitas berjuang demi bangsa dan negara. Jika dasarnya adalah semata ketaatan pada negara atau upah, maka seperti dikatakan oleh Kiai Wahab tidak ada syahid atau pahala akhirat. Berjuang pun setengah-setengah, tidak totalitas. Tapi jika motivasinya agama, maka tanpa dibayar pun orang rela berkorban harta dan nyawa. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh As'ad Said Ali: "logika Kiai Wahab ini merupakan logika muslim yang butuh mendasarkan praktik kenegaraannya pada motivasi agama. Sebab, jika dasar negara bukan agama, pembelaan terhadap negara tidak memiliki nilai transenden yang tersambung langsung kepada Allah *subhānahu wa ta'āla*".³⁰⁴ Dengan dasar Islam, pembelaan terhadap bangsa dan negara dinilai sebagai pembelaan terhadap agama itu sendiri. Aksi bela bangsa dan negara dengan demikian adalah salah satu cara bagi muslim untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah *subhānahu wa ta'āla* dan dicatat sebagai amal salih dengan syarat bila didasari motivasi agama.

Di lain pihak upaya mendasarkan negara pada Islam ini secara politis juga demi menggagalkan upaya PKI dalam mensekulerkan dan mengkomunikasikan Pancasila

³⁰³ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, Cet. 3, 2010), 270-274.

³⁰⁴ As'ad Said Ali, "Kiai Kiai Wahab dan Nasionalisme Islam", dalam Choirul Anam, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Hidup dan Perjuangannya* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2015), xiii.

Kiai Wahab hidup di era di mana umat Islam mengalami perampasan dua macam kemerdekaan sekaligus: kemerdekaan bertanah air (*ḥurriyat al-waṭaniyah*) Indonesia dan kemerdekaan beramal Aswaja (*ḥurriyat al-‘amal bi mafāhim Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*). Poin pertama ditandai dengan kolonialisme Belanda dan Jepang. Sedangkan poin kedua ditandai dengan semakin meluasnya pengaruh paham Wahabi di Nusantara. Paham ini, seperti kita ketahui, bersikap reaksioner dan intoleran atas tradisi-tradisi Islam lokal yang telah hidup ratusan tahun lalu di Indonesia. Tak jarang sikap reaksioner dan intoleran itu memicu terjadinya konflik masyarakat akar rumput (*grass root*) dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Menjawab tantangan kolonialisme dan wahabisme tersebut, Kiai Wahab mengorganisir ulama dan santri dalam wadah Taswirul Afkar (1914), Nahdlatul Wathon (1916), Nahdlatut Tujjar (1918), Ta‘mirul Masajid (1922), Nahdlatul Ulama (1926), serta aktif dalam organisasi-organisasi politik kaum modernis dan nasionalis seperti Sarikat Islam (SI), Budi Utomo, dan lain-lain. Masing-masing dari organisasi tersebut pada dasarnya adalah penanda atas cita-cita (*himmah*) perjuangan Kiai Wahab. Taswirul Afkar melambangkan cita-cita kemerdekaan

banyak memiliki budak. Budak Rasulullah antara lain bernama Zaid bin Ḥārithah dan putranya Usāmah bin Zaid, Abu Kabshah, Shaqrān, Robbāḥ, Yasār, Abū Rābi‘, Ummu Rāfi‘, Ummu Aiman, dan lain-lain. Sahabat Abu Bakar memiliki budak bernama ‘Amir bin Fuhairah, Abdullah bin ‘Abbās memiliki budak ‘Ikrimah --seorang mufassir terkemuka, Ḥudzaifah bin al-Yamān memiliki budak bernama Aḥmad bin ‘Umar bin Ḥafṣ al-Wakī‘i. Dari kalangan Tābi‘in, terdapat Umar bin ‘Abd al-‘Aziz yang memiliki budak bernama Abu al-Ḥasan bin Abi Shu‘aib al-Ḥarrāni. Mereka adalah generasi terbaik yang lebih tahu tentang Islam. *Toh* demikian generasi emas tersebut masih memiliki budak meski cara memperlakukan mereka tidak layaknya budak, tetapi lebih manusiawi. Tidak membebani mereka pekerjaan di atas kemampuannya. Beberapa di antara budak itu, berkat didikan tuannya, bahkan menjadi ulama besar semisal ‘Ikrimah, budak laki-laki yang mewarisi ilmu tuannya, Ibn ‘Abbas, sebagai ahli tafsir. Hemat penulis, ungkapan “penertiban” – tanpa mengurangi sedikit pun nilai humanis Islam-- lebih tepat digunakan, lebih etis, dan lebih hati-hati. Jauh dari kesan seolah perbudakan itu dihapus (di *naskh*) hukum kebolehannya. Tentang historiografi kaum *mawālī* (budak-budak) di atas, lihat misalnya Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān bin Yūsuf al-Mizziy, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980).

Kiai Wahab adalah sosok dinamis. Meski memusuhi Belanda, ia tetap mengakui keabsahan pemerintahan Hindia-Belanda karena alasan darurat. Kudeta atas pemerintahan Belanda sebelum mempersiapkan infrastruktur kenegaraan yang kuat akan berimbas pada kerusakan massal. Secara fikih kondisi darurat bisa membenarkan sesuatu yang terlarang. Dalam kasus-kasus tertentu ia bisa saja menyetujui kebijakan Belanda tanpa kehilangan sikap kritisnya. Prinsip yang dianut adalah *akhaff al-dararain* (menggambil keputusan yang paling minim resiko di antara dua pilihan yang sama-sama beresiko). Contoh, kehadirannya di Batavia memenuhi undangan pejabat Belanda *hoofd adviser inlandsche zaken* (penasihat pengadilan untuk urusan dalam negeri) pada 20 Agustus 1927. Pertemuan yang juga dihadiri KH. Mas Mansur, Tjokroaminoto, KH. Abdul Halim, dan beberapa tokoh Islam lintas ormas itu membahas ordonansi Islam seperti perkawinan, perceraian, dan rujuk. Diundangnya tokoh-tokoh Islam tersebut adalah bagian dari politik keagamaan Belanda untuk mempertahankan status *quo*-nya di Indonesia. Pihak Belanda mengklaim bahwa mereka peduli dengan aturan keagamaan umat Islam sehingga perlu melibatkan tokoh-tokoh Islam dalam proses pengambilan keputusan.

Ordonansi perkawinan terdiri atas beberapa poin usulan. *Pertama*, seorang muslim yang hendak menikah wajib lapor ke kepala dusun (lurah), lalu ke *modin* (petugas pencatat nikah tingkat desa), dan terakhir ke penghulu. *Kedua*, perkawinan, cerai, dan rujuk harus dilakukan di depan penghulu dan dicatatkan di buku register khusus. *Ketiga*, penghulu berhak memungut biaya nikah, cerai, dan rujuk dari pihak-pihak terkait yang besarnya ditentukan oleh bupati setempat.

Logika Kiai Wahab ini adalah logika hukum yang berorientasi masa depan dengan mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan (*al-naẓr ila al-ma‘ālāt*).³⁵⁹ Sikap politik Kiai Wahab ini memperlihatkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah yang utama. Namun, fleksibilitas dalam menghadapi Belanda tetap diperlukan demi menghindari mudarat dan

³⁵⁹ Dengan logika ini pula (*al-naẓr ila al-ma‘ālāt*) Kiai Wahab menyetujui tawaran Bung Hatta (tahun 1948) agar Masyumi (saat NU belum memisahkan diri dari Masyumi) bersedia duduk dalam kabinet yang sedang dibentuk olehnya. Dalam menyikapi tawaran itu, sebagaimana diceritakan Saifuddin Zuhri, sebagian menolak dan sebagian menerima. Pihak yang menolak memakai alasan karena dalam program Kabinet Hatta yang akan terbentuk dicantumkan antara lain: melaksanakan persetujuan Renville. Pihak yang menolak beralasan persetujuan Renville itu dipandang dari sudut hukum Islam merupakan suatu pengkhianatan dan *munkarat*, hukumnya haram. Sebab itu, tidak boleh duduk dalam suatu kabinet yang hendak melaksanakan Renville. Menanggapi alasan tersebut, Kiai Wahab berkata, “justeru untuk melenyapkan *munkarat* ini, kita harus duduk dalam kabinet Hatta. Tiap-tiap *munkarat* adalah suatu penyelewengan yang harus kita lenyapkan. Tugas kita melenyapkan. Sikap menolak saja sudah terlambat karena persetujuan Renville ini sudah ditandatangani oleh negara dengan negara. Kita bukan lagi berkewajiban menentang. Itu sudah lampau. Kini kewajiban kita melenyapkan. Kita hanya bisa melenyapkan *munkarat* jika kita duduk dalam kabinet ini. Kalau kita Cuma berdiri di luar kabinet, kita Cuma bisa teriak-teriak *tok (saja)*”, terang Kiai Wahab. Usulan Kiai Wahab itupun diterima oleh forum dan Masyumi menerima tawaran duduk dalam Kabinet Hatta. Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, Cet. 3, 2008), 362-363. Kasus lain yang disikapi dengan logika serupa adalah mengenai persoalan model pakaian seragam pandu Ansor. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Sejarah Tambakberas, suatu hari terjadi perdebatan antara Kiai Wahab dengan Kiai Asnawi Kudus berkisar persoalan di atas. Ketika itu pandu Ansor menggunakan celana pendek, yang dalam pandangan fikih, membuka aurat dan itu dosa. Kiai Asnawi meminta kepada Kiai Wahab sebagai penanggung jawab agar mengubah pakaian pandu Ansor atau kalau tidak bisa, jangan ikut pandu. Namun, Kiai Wahab tidak setuju usulan Kiai Asnawi, meskipun Kiai Asnawi sempat mengancam akan keluar dari NU jika usulannya tidak diakomodir. Kiai Wahab tetap dalam pendiriannya tentang pakaian seragam pandu Ansor. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan besar pada Kiai Bisri Syansuri yang ketika itu ikut mengantar sekaligus mendengarkan perdebatan Kiai Wahab dengan Kiai Asnawi Kudus. Suatu hari Kiai Bisri *sowan* (bertamu) ke kediaman Kiai Wahab dan mempertanyakan sikap Kiai Wahab yang menolak usulan Kiai Asnawi, meskipun Kiai Asnawi sempat mengancam akan keluar dari NU. Kiai Wahab menjelaskan, “begini, saya tidak khawatir jika Kiai Asnawi itu keluar dari NU, sebab beliau kiai alim dan *wara’* (pandai menjaga kehormatan diri). Beliau akan tetap menjadi orang salih meskipun tidak bergabung dengan NU. Tetapi saya berpikir bagaimana anak muda kita kalau tidak bergabung dengan Ansor. Mereka akan dipengaruhi pola hidup penjajah atau akan ikut gerakan PKI. Hal ini yang saya pikirkan sampai gelisah, maka bagi saya untuk sementara biar itu berjalan, dan ketika para pemuda itu sudah masuk komunitas Ansor, maka secara perlahan pemuda itu akan menjadi santri”, demikian Kiai Wahab berargumen. Dua contoh kasus di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa hukum oleh Kiai Wahab tidak dilihat secara hitam putih. Melainkan juga harus mempertimbangkan dampak maslahat-mudarat yang ditimbulkan, dan inilah esensi dari logika fikih *al-naẓr ila al-ma‘ālāt*. Tim Sejarah Tambakberas, *Tambakberas: Menelisik Sejarah*, 495-496.

kondisi-kondisi tertentu bahkan menjadi wajib.³⁶⁴ Kiai Wahab memasukkan persoalan ini dalam kaidah *al-sabab fī ḥukmi al-musabbab wa al-umūru bi maqāṣidihā* (hukum sebab mengikuti hukum akibat dan segala sesuatu tergantung pada motif perbuatannya). Di lain pihak ada dua riwayat yang justru memerintahkan belajar menulis. *Pertama*, *inna min ḥaqqi al-walad ‘ala wālidihī an yu‘allimahu al-kitāb* (sesungguhnya di antara hak anak atas kedua orang tuanya adalah mengajarkannya menulis). Kiai Wahab, mengutip Ibn Ḥajar, menafsirkan kata *al-kitāb* pada hadis di atas dengan arti menulis (*al-kitābah*). Sedangkan *al-walad* mencakup baik anak lelaki maupun perempuan. *Kedua*, hadis riwayat al-Shifā’ binti ‘Abdullāh: *‘allimihā ruqyat al-namlah kamā ‘allamtihā al-kitābah* (ajarkan Hafṣah *ruqyat al-namlah* sebagaimana engkau mengajarnya menulis). Dua hadis di atas tegas menyatakan kebolehan mengajar perempuan menulis. Memakruhkan perempuan belajar menulis sama halnya mencela Rasulullah yang mendiamkan isterinya, Hafṣah, melakukan kemakruhan dengan belajar menulis pada al-Shifā’ binti ‘Abdullāh.³⁶⁵

Lagi pula menurut Kiai Wahab anjuran untuk tidak mengajar perempuan menulis sebab khawatir timbul kerusakan sudah tidak lagi relevan. Mengajar

³⁶⁴ Kiai Wahab mencontohkan kondisi di mana perempuan wajib belajar menulis:

قَدْ تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ تَعَلُّمُ وَ تَعْلِيمُ الْكِتَابَةِ وَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَأْسُورَةً أَوْ مَسْرُوقَةً فَصَارَتْ تَحْتَ قَبْضَةِ كَافِرٍ وَ لَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلَّا بِتَعْلَمِهَا الْكِتَابَةَ مِنْ ذَلِكَ الْكَافِرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَيَتَعَلَّمُهَا الْكِتَابَةَ يُمَكِّنُ إِسْرَافَ الْكِتَابِ إِلَى أَهْلِهَا فَيَتَلَفُّوْهَا وَ يَأْخُذُوْنَهَا مِنْ ذَلِكَ الْكَافِرِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَ هَذَا دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ بِمَقْاصِدِهَا.

“Terkadang wajib bagi perempuan belajar dan mengajar menulis. Semisal jika seorang perempuan tertawan atau diculik, lalu berada dalam sekapan orang kafir. Ia tidak mampu melepaskan diri kecuali dengan belajar menulis dari si kafir atau orang lain. Dengan belajar menulis memungkinkan baginya untuk berkirim surat ke keluarga, lalu mereka menerima surat itu darinya dan akhirnya membebaskannya dari sekapan si kafir. Karena *sesungguhnya syarat yang tanpanya tidak dapat dilaksanakan kewajiban maka syarat itu menjadi wajib*. Ketentuan ini masuk dalam cakupan kaidah *segala sesuatu tergantung motif perbuatannya*”. Lihat Swara NU, Nomor 7, Rajab [?] 1346 H, 6.

³⁶⁵ Swara NU, Nomor 7, Rajab [?] 1346 H., 2.

pemberontakan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Gerakan makar itu berhasil dilumpuhkan dan beberapa tokoh komunis Indonesia lari ke luar negeri.

Kedua, kegagalan Amir Syarifudin, tokoh PKI, dalam Perjanjian Renville membuatnya terdepak dari pemerintahan. Berharap kendali pemerintahan bisa kembali kepadanya, ia dibantu Muso melakukan pemberontakan tahun 1948 yang dikenal sebagai peristiwa *Madiun Affairs*.⁴²² Dalam pemberontakan PKI di Madiun ini jelas sekali Belanda memberikan bantuan logistik kepada pemimpin PKI, Amir Syarifuddin. Belanda juga turut menyiarkan berbagai propoganda selama PKI menguasai daerah Madiun-Solo dan sekitarnya melalui koran dan radio Belanda. Selain itu, Belanda melindungi para pemberontak ketika mereka dipukul mundur oleh TNI dan kemudian melindungi mereka di daerah jajahannya. Bahkan para tokohnya seperti Aidit, Alimin, dan Soemarsono dilarikan ke luar negeri agar selamat dan bisa kembali berkonsolidasi. Dalam peristiwa *Madiun Affairs* ini yang menjadi sasaran utama mereka adalah para kiai, ulama, ustad, aparat desa yang tidak mau ikut mereka, rumah-rumah ibadah, serta pesantren. Mereka dianiaya, dibunuh secara kejam, dan mayatnya dilempar ke dalam sumur atau dibuang begitu saja. Karena pemberontakan kaum komunis tidak mendapat dukungan rakyat, maka dalam waktu sepuluh minggu pemberontakan mereka dapat ditumpas dan dibasmi. Namun, patut disayangkan mereka mendapat pengampunan dari Presiden

⁴²² Menjelang pecahnya pemberontakan, kebetulan sekali NU mengadakan latihan ulama di kota Ngawi. Setelah latihan selesai, para utusan hendak pulang ke daerah masing-masing. Tanpa mereka ketahui komunis sudah mulai dengan pemberontakannya. Kiai Wahab pulang ke Jombang dengan naik kereta api. Perjalanan ke Jombang ini harus melewati Madiun yang waktu itu menjadi basis kaum komunis. Jika tidak hati-hati ia pun akan tertangkap. Kiai Wahab pun memutar otak. Maka ia lepaskan serbannya dan menggantinya dengan peci. Kiai Wahab yang biasa dilihat orang dengan serbannya menjadi tidak dikenali dengan mengenakan peci. Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, 380.

Sketsa Historis Karir Sosial KH. Abdul Wahab Chasbullah

<p align="center">Periode Pra Kemerdekaan, 1912-1945 (Era Kolonial Belanda dan Jepang).</p>	<p align="center">Periode Revolusi Fisik (Perang Mempertahankan Kemerdekaan), 1945-1949.</p>	<p align="center">Periode Pergumulan di Era Kemerdekaan, 1950-1971: Periode Orde Lama dan Orde Baru</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawali dengan mendirikan Sarekat Islam (SI) Cabang Makah bersama kawan-kawannya: Kiai Asnawi (Kudus), Kiai Abbas (Jember), Kiai Dahlan (Kertosono), 1912-an. 2. Mendirikan Taswirul Afkar di Surabaya, 1914 --> Simbol gerakan keilmuan dan kebudayaan. 3. Mendirikan Nahdlatul Wathon di Surabaya, 1916 --> Simbol gerakan politik dalam bentuk penguatan semangat kebangsaan melalui aktivitas pendidikan kewargaan. 4. Mendirikan Nahdlatut Tujjar, 1918 --> Simbol gerakan kemandirian ekonomi. 5. Aktif dalam forum Indonesia Studie Club yang didirikan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari agresi militer Belanda dan sekutunya yang berniat menguasai kembali tanah jajahannya. 2. 22 Oktober 1945 keluar fatwa Resolusi Jihad. --> KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama para kiai lainnya seperti KH. M. Hasyim Asy'ari (Rois Akbar NU), KH. Masjkur (Pemimpin Laskar Sabilillah), KH. Zainul Arifin (Pemimpin Laskar Hizbullah) tampil sebagai pemimpin-pemimpin NU yang memimpin perjuangan rakyat melawan niat jahat militer Belanda dan sekutunya yang hendak menguasai kembali tanah jajahannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 1950-1959 KH. Abdul Wahab Chasbullah tampil sebagai pemimpin utama NU (Rais Aam). Setiap keputusan besar NU selalu melibatkan Kiai Wahab. 2. KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama para kiai NU lainnya sepakat menetapkan Presiden Soekarno sebagai <i>Waliy al-Amr al-Darūri bi al-Shawkah</i>, 1954. --> Konsekuensinya setiap gerakan menentang pemerintahan yang sah, termasuk gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo, adalah <i>bughat</i> (pemberontak). 3. Di bawah kepemimpinan KH. Abdul Wahab Chasbullah, NU memisahkan diri dari Masyumi akibat konflik internal antara keduanya. NU pun

Pada periode pertama (Pra-Kemerdekaan), tantangan utama Kiai Wahab adalah kolonialisme (penjajahan Belanda dan Jepang) dan puritanisme. Oleh sebab itu, tenaga dan pikiran Kiai Wahab pada periode itu banyak tercurahkan untuk mencari solusi jalan-keluar atas kedua problem utama tersebut. Kiai Wahab sadar bahwa dengan posisi bangsa Indonesia saat itu yang lemah dari segi politik, ekonomi, pendidikan, militer, serta peta perjuangan yang belum sepenuhnya terorganisir rapi tentu membuat cita-cita merdeka sulit terwujud. Karena itu, upaya yang dilakukannya demi meraih kemerdekaan adalah dengan membangun infrastruktur (*wasā'il*) perjuangan baik politik, pendidikan, ekonomi, dan juga militer yang masing-masing berorientasi pada terbangunnya sikap kritis atas kebijakan-kebijakan politis kaum penjajah (Taswirul Afkar), pemerataan akses pendidikan yang berwawasan Islam dan keindonesiaan (Nahdlatul Wathon), terbangunnya kemandirian ekonomi umat melalui gerakan koperasi (Nahdlatul Tujjar), serta terbentuknya pasukan militer yang kuat di kalangan pribumi. Patut dicatat juga bahwa konsep pendidikan yang diidealkan Kiai Wahab tidak hanya berorientasi pada pendidikan intelektual (olah pikir) dan mental-spiritual (olah jiwa), tetapi juga pendidikan jasmaniah (fisik) baik dalam bentuk olahraga (Pencaksilat) ataupun latihan kemiliteran.

Dalam menjalankan misi di atas, Kiai Wahab tidaklah sendirian. Ia bekerjasama dengan kelompok sosial lainnya seperti kaum nasionalis dalam wadah Indonesia Studie Club bentukan Dr. Soetomo, juga dengan kelompok-kelompok Islam lainnya baik itu Sarekat Islam (SI) atau ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan lainnya. Karena sejak awal memiliki

orientasi ideologis yang saling bertolakbelakang, hubungan antara Kiai Wahab dengan ormas-ormas Islam berideologi puritan tersebut pada paruh awal periode pertama tidak berjalan harmonis. Alih-alih menggalang upaya kerjasama mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, keberadaan ormas-ormas Islam tersebut justru menjadi ancaman bagi eksistensi kaum tradisional. Dalam suasana konflik modernis-tradisionalis inilah NU terlahir tahun 1926.

Sadar bahwa rivalitas keduanya (tradisionalis-modernis) sama sekali tidak menguntungkan umat Islam dan bangsa Indonesia, menjelang akhir tahun 1930-an keduanya pun berdamai dan membentuk badan federasi bernama MIAI (cikal bakal Masyumi) sebagai wadah perjuangan bersama. Kerjasama tersebut selanjutnya ditingkatkan bukan hanya di internal umat Islam, melainkan juga meluas dengan melakukan kerjasama Islam-Nasionalis yang masing-masing direpresentasikan oleh MIAI dan GAPPI. Kerjasama ini menyepakati dibentuknya badan permusyawaratan nasional bernama Korindo (Kongres Rakyat Indonesia), tahun 1941.

Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai masuknya fase baru dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada fase ini ujian berat bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaannya dari niat jahat militer Belanda dan sekutunya (NICA) yang hendak menguasai kembali tanah bekas jajahannya. Menyikapi hal itu, KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama para pemimpin NU lainnya se Jawa-Madura, dipimpin langsung oleh KH. M. Hasyim Asy'ari, berkumpul di Surabaya pada 21-22 Oktober 1945 guna membahas situasi yang tengah terjadi. Rapat selama tiga hari itu melahirkan keputusan penting berupa fatwa Resolusi Jihad, 22 Oktober

Saat kedaulatan negara telah dikuasai bangsa Indonesia dan sistem politik mulai tertata, masuklah Kiai Wahab pada periode ketiga (1950-1971) yang ditandai oleh keterlibatannya dalam pentas politik nasional. Sejak awal Kiai Wahab menginsafi bahwa tujuan berbangsa dan bernegara tak lain adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, bertakwa, dan berbudi luhur dalam naungan rida Allah SWT. Dalam merealisasikan tujuan di atas Kiai Wahab menghadapi kenyataan bahwa ada segolongan orang yang mengusung ideologi tak sehaluan dengannya dan bahkan membahayakan masa depan agama, bangsa, dan negara yang baru merdeka. Itulah sebabnya, pada periode ini perjuangan Kiai Wahab dititikberatkan pada upaya mengamankan negara dari beragam ideologi serta gerakan-gerakan subversif yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Merasa Masyumi tidak lagi mampu menampung aspirasi politik para kiai NU, Kiai Wahab memutuskan NU keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai mandiri pada tahun 1952. Sejak saat itu NU terlibat aktif dalam konstelasi politik nasional dan selalu ambil bagian dalam penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri. Salah satu prestasi besar Kiai Wahab adalah ia mampu menahkodai NU hingga membawanya menjadi partai pemenang pemilu 1955 di urutan ketiga, dan di urutan kedua pada pemilu 1971. Dalam tiga periode inilah Kiai Wahab telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia yang meliputi kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, pemerataan akses pendidikan, serta keselamatan bangsa dari beragam ideologi ekstrem-intoleran. Kiprahnya dalam memperjuangkan keamanan nasional serta ideologi negara itu tercermin dari topik-topik pidato yang ia sampaikan dalam berbagai forum resmi kenegaraan atau selainnya.

V	Pekalongan	15-17 Rabī' al-Thāni 1349 H/8-11 September 1930 M
VI	Cirebon	10-12 Rabī' al-Thāni 1350 H/24-26 Agustus 1931 M
VII	Bandung	12-16 Rabī' al-Thāni 1351 H/15-19 Agustus 1932 M.
VIII	Rumah Sayyid Ismail bin Abdullah bin Alawi al-Attas, Jati Petamburan Jakarta	13-17 Muharram 1352/6-11 Mei 1933 M.
IX	Madrasah al-Khairiyah, Banyuwangi	8-12 Muharram 1353 H/21-26 April 1934 M.
X	Solo	14-18 April 1935 M.
XI	Banjarmasin	19-23 Rabī' al-Awwal 1355 H/9-13 Juni 1936 M.
XII	Malang	11-15 Rabī' al-Thāni 1356 H/20-24 Juni 1937
XIII	Menes, Banten	13-18 Rabī' al-Thāni 1357 H/11-16 Juni 1938 M.
XIV	Hotel Semarang, Magelang	14-19 Jumadi al-Awwal 1359 H/1-6 Juli 1939 M.
XV	Surabaya	10-15 Dhu al-Qa'dah 1359 H/9-15 Desember 1940 M.
XVI	Purwokerto	23-26 Rabī' al-Akhir 1365 H/26-29 Maret 1946 M.

sosial-politik yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab moral mereka. Di lain pihak siasat adu domba (*divide et impera*) Belanda juga menjadikan golongan ulama berseteru satu sama lain akibat perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip (*mukhtalaf fi'h*). Mereka lupa bahwa di luar sana banyak masalah serius yang jauh lebih penting untuk diselesaikan. Mahfudz Shiddiq,⁴⁶² dalam Berita NU tahun 1938 menarasikannya sebagai berikut:

Para oelama kita pada sebeloem 13 tahoen itoe, satoe dengan lainja ta' kenal mengenal atau koerang rapat tali perhoeboengannja hanja selakoe kenalan sadja, tiada sampai pada bersama-sama kerdja oentoek agama dan oemat oemoem. Bahkan kadang-kadang adakalanja di antara mereka juga semboer-semboeran antara satoe dengan lainnja dipersebabkan berselisihan dalam masalah atau sebab lainnja. Sebagian dari pada mereka tidak mengetahoei keadaan kehinaan oemmat Islam jang di loear pagar roemahnja teroetama di tempat jang lebih djauh dari roemahnja.⁴⁶³

⁴⁶² Pada sumber yang peneliti jadikan rujukan (Berita Nahdlatul Ulama, tahun 1938) tertulis nama Ach. Shiddiq (Jember) sebagai penulis artikel, bukan Mahfudz Shiddiq. Peneliti menduga terjadi kesalahan penulisan nama. Sebab, saat itu Ach. Shiddiq masih berusia 12 tahun (lahir 1926). Adalah tidak rasional anak usia 12 tahun mampu menulis artikel ilmiah sebaik itu. Penulis sesungguhnya menurut peneliti adalah Mahfudz Shiddiq, kakak dari Achmad Shiddiq yang juga merupakan pimpinan redaksi Berita Nahdlatul Ulama.

⁴⁶³ Ach. Shiddiq (Mahfudz Shiddiq?), "Riwayat dan Djasa N.O", dalam *Berita NU*, No. 4, Tahun ke-8, (22 Syawal 1357/15 Desember 1938), 59. A. Ch. Shiddiq membagi sejarah perkembangan NU tahun 1926-1938 (13 tahun) ke dalam tiga fase (*idārah*). *Pertama*, adalah fase konsolidasi melalui upaya "*meroendingkan masalah dan choekoem-choekoem fiqhijjah dengan para oelama jang tengah dalam bertikai itoe. Karena choekoem-choekoem fiqhijjah itoe soenggoeh nampaknja ketjil tetapi akibatnja besar*". Terlihat dari pernyataan Shiddiq di atas, pada fase ini perhatian dipusatkan pada upaya menyatukan pandangan ulama tentang hukum fikih. Sebab, ketaksepahaman dalam hukum fikih kerap membuat mereka sulit bersatu. *Kedua*, adalah fase mengupayakan terlaksananya keputusan fikih dalam segala aspek kehidupan. Yaitu: "*membawa oemmat dan masjarakat ke dalam 'alam Islaamijji dalam segala-segalanja. Oempama: bergaoel setjara Islam, djoel beli setjara Islam, kawin setjara Islam, berdagang setjara Islam, bertani setjacara Islam, beranak, mantoe, selamatan, adab, sopan santoen, pakaian, mawarist, mengoeboer, mendidik, mengatoer roemah-tangga, mengopah, dan jang sematjam semoea setjara Islam*". Shiddiq menilai hal di atas bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, umat Islam Indonesia kala itu belum 50% kesadarannya. Apabila diajak bekerja berat mewujudkan keputusan-keputusan di atas mereka berkeluh-kesah dan selalu mencari alasan untuk tidak turut serta. Oleh sebab itu, dalam fase ini proses penyadaran dan penginsafan umat atas tanggung jawab mereka sebagai muslim juga terus digalakkan. *Ketiga*, adalah fase mempersatukan, menyadarkan, dan mengembalikan umat dalam segala lapisannya ke dalam dunia Islamiah di segala aspeknya (pada fase ini dua tokoh NU: Kiai Wahab dan Kiai Ahmad Dahlan Kebondalem mempelopori berdirinya MIAI). Buah dari perjuangan selama 13 tahun itu menurut Shiddiq di antaranya adalah: "*oelama-oelama kita jang saling tjakar tahadi mendjadi bersatoe jang tegoeh, masalah-masalah jang diselisahkan mendjadi beres dengan baiknja. Pemoeda-pemoeda kita jang hanja gemar meboeang waktoenja lantass sama menjingsing badjoe-lengannja oentoek berdjoeang dalam medan masjarakat, oemmat, dan agama. Begitoe*

dibenarkan selama menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, kebaikan (tidak berbuat zalim), saling menghormati, serta kepatuhan atas batasan-batasan dalam agama. Di situlah letak Islam *rahmatan li al-‘alamīn* sebagaimana ia cita-citakan.



di makam tersebut, Kiai Wahab ditemui secara gaib oleh Kiai Usman. Dalam “pertemuan” itu Kiai Wahab dipesani: “*Berjuang ojo mung mbelo umat Islam. Lek awakmu mung merjuangno umat Islam bakal kalah. Berjuang kanggo umate Gusti Allah*”. Artinya, berjuang itu jangan hanya membela umat Islam. Jika kamu berjuang hanya untuk umat Islam niscaya kamu akan kalah. Berjuanglah engkau untuk umat (hamba) Allah (tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras). Mbah Fatih (bin Mujib bin Aqib bin Tandur bin Kiai Usman, 70 tahun), *Wawancara*, Jombang, 22 Agustus 2019.

Karya-karya di atas di dunia pesantren dikenal luas dengan sebutan kitab kuning (karena kertas kitab umumnya berwarna kuning). Tidak hanya difungsikan sebagai buku ajar fikih, melainkan juga sebagai dasar pengambilan keputusan hukum (*marāji'*) dalam forum akademik *Baḥt al-Masā'il*. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah kitab-kitab yang ditulis di abad klasik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan kekinian dan mampu menjawab persoalan-persoalan mutakhir yang terus berkembang?

Bagi seorang Kiai Wahab jawabnya tentu mungkin selama persoalan yang ada diletakkan secara proporsional. Dalam Islam ada hal-hal prinsip yang bersifat final (tetap), tak bisa diubah, dan berlaku sepanjang masa seperti masalah akidah, ibadah *maḥḍah* (salat, puasa, haji, dan semacamnya), serta nilai-nilai universal ajaran Islam seperti proteksi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (*al-darūriyāt al-khams*). Di luar itu ada aspek-aspek lain dari ajaran Islam yang dimungkinkan beradaptasi mengikuti laju perputaran zaman serta perkembangan pemikiran dan peradaban manusia seperti transaksi muamalah dan hukum ketatanegaraan. Di luar hal-hal yang bersifat prinsip, Kiai Wahab memandang boleh, bahkan perlu melakukan kontekstualisasi atas hasil ijtihad masa lalu demi mengakomodir kebutuhan saat ini. Sebab, menyelesaikan problem kekinian dengan takaran masa lalu yang kurang relevan bukanlah sikap bijak, sebagaimana membuang kekayaan intelektual masa lalu dengan alasan hidup kekinian adalah wujud dari keangkuhan intelektual.

pula: Nu'mān Jaghīm, *Madkhal ila al-Madhhab al-Shāfi'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 54-67.

muktabar itu bersumber dari nas al-Qur'an dan hadis baik disebut secara eksplisit (*sharīh*), melalui penyimpulan induktif (*istiqrā'*), pengungkapan *'illat* atau alasan rasional hukum (*ta'īl*), dan lainnya. Secara redaksional, Waliyullah al-Dihlawiy seperti dikutip Bin Bayyah mengatakan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam nas al-Qur'an atau hadis diungkapkan melalui redaksi yang menyatakan keridaan atau kemurkaan Tuhan, dicintai atau dibenci Tuhan, dikasihi atau dilaknat Tuhan, dekat atau jauh dari Tuhan, serta penyandaran perbuatan pada golongan yang diridai Tuhan: para nabi, malaikat, penduduk surga, atau pada golongan yang dimurkai Tuhan: setan, orang munafik, dan penduduk neraka. Misal, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 222 yang maknanya “*sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri*”. Dari situ diketahui bahwa di antara *maqāṣid al-sharī'ah* adalah taubat dan penyucian diri.⁵³⁹

⁵³⁹ ‘Abdullāh bin Bayyah, *Alāqat Maqāṣid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiqh* (Makah: Markaz Dirāsāt Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah, 2006), 75-85.

relasi saling melengkapi (*al-takāmuliyah*). *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar filosofisnya, dan *uṣūl al-fiqh* sebagai dasar dan kerangka metodologisnya.

Pembacaan fikih dogmatik (normatif) hasil ijtihad para imam mesti ditempatkan dalam perspektif keduanya (*maqāṣid al-sharī'ah* dan *uṣūl al-fiqh*). Jika hasilnya mampu mengakomodasi problem kekinian, maka tinggal mengaplikasikan (*taṭbīq*) begitu saja. Namun jika tidak, maka perlu melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi dengan meminjam gaya penalaran (*manhaj al-fikr*) para imam yang prosedur dan teknisnya diatur dalam teori *uṣūl al-fiqh* dan kaidah fikih. Akomodatif tidaknya produk ijtihad masa lalu itu dapat dikenali ketika seorang yuris memiliki data lengkap mengenai permasalahan yang terjadi: siapa subyeknya, apa motif perbuatannya, apa pokok masalahnya, bagaimana prediksi maslahat-mudarat yang diakibatkannya, serta bagaimana *setting* sosial yang melatarinya. Pembacaan fikih dengan demikian juga tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial. Dengan demikian ada tiga aspek yang harus dicermati: *maqāṣid*, teks, dan konteks.

Tiga hal ini tergambar jelas, misalnya, pada contoh kasus pembongkaran bekas makam (kuburan) demi perluasan areal Masjid Peneleh, Surabaya. *Maqāṣid*-nya adalah menghadirkan *al-maṣlahat al-'āmmah* --kemaslahatan umum (agar masjid mampu menampung jamaah salat Jum'at yang membludak), dasar penyusunan dalil (analisis teks) diambil dari karya-karya fikih ulama mazhab Shāfi'i baik yang normatif ataupun metodologis (*uṣūl al-fiqh* dan kaidah fikih), sedangkan data mengenai konteks kejadian diperoleh langsung Kiai Wahab melalui observasi dan

Asy'ari demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks ini, kemerdekaan Indonesia adalah wasilah agar umat Islam Indonesia leluasa beribadah serta memperoleh hak-hak sipilnya sebagai warga negara. Kemerdekaan itu tidak dapat dipertahankan tanpa wasilah perang suci (*jihad fī sabīlillāh*) melawan pasukan sekutu. Jika demikian, maka perang suci itu pun menjadi wajib sebab wajibnya membela agama, bangsa, dan negara.

Prinsip keempat adalah memutus perkara berdasarkan pertimbangan maslahat-mudarat yang paling dominan. Mekanisme yang digunakan secara umum adalah pertama jika maslahat-mudarat nilainya sama, misal sama-sama *munjazah* (riil) atau sama-sama *madznūnah* (spekulatif), maka berlaku kaidah *daf'u al-mafāsidi muqaddam 'ala jalbi al-maṣālihi* (menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan). Contoh, mengkonstitusikan Islam dengan cara memformalkan tujuh kata Piagam Jakarta memiliki dua potensi sekaligus. Pertama, kepastian hukum syariat Islam ditegakkan di Indonesia. Ini maslahatnya, ada pengakuan negara mengenai kedudukan syariat Islam di Indonesia. Kedua, mafsadahnya adalah dikhawatirkan terjadi perpecahan nasional karena tidak semua penduduk Indonesia adalah muslim. Kedua potensi tersebut adalah riil (*munjazah*) karena telah ada indikator-indikator sebelumnya. Maka, dalam hal ini menghindari kerusakan (perpecahan nasional) lebih didahulukan ketimbang menghadirkan kemaslahatan. Kiai Wahab pun akhirnya menerima Dekrit Presiden 1959 dengan pertimbangan lebih mengutamakan persatuan nasional. Sejak saat itu, diskursus mengenai hubungan Islam dan Pancasila ia anggap final dan tidak dipermasalahkan lagi hingga wafatnya.

Sebagai pemikir sekaligus aktivis pergerakan, pemikiran-pemikiran Kiai Wahab mengenai keislaman dan kebangsaan dapat ditelusuri dari latar keagamaan dan pendidikan, serta latar sosial yang mengitarinya. Yaitu institusi pesantren tempat ia belajar dan dibesarkan, paham Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dengan pola ajaran moderat (*al-tawassuṭ*), adil (*al-i'tidāl*), toleran (*al-tasāmuh*), dan menjaga keseimbangan (*al-tawāzun*), serta penguasaan atas logika hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), dan terakhir adalah pergaulan sosial yang luas. Empat hal ini adalah beberapa variabel penting yang mendasari atau mengakari pemikiran keagamaan dan kebangsaan Kiai Wahab sebagaimana tersirat dalam berbagai uraian sebelumnya. Uraian di bawah ini menjelaskan secara sepintas tentang keempat variabel tersebut.

1. Tradisi Pesantren

Sebagaimana telah diulas di bagian sebelumnya, Kiai Wahab terlahir dan tumbuh besar di lingkungan pesantren hingga wafat. Kedua orang tuanya adalah pemimpin Pesantren Tambakberas, Jombang, dan masih memiliki garis keturunan dengan Kiai Abdus Salam, pejuang kemerdekaan di era Pangeran Diponegoro. dan bila ditarik terus ke atas silsilahnya juga bersambung pada raja-raja Jawa. Pasca kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830), pondok pesantren menjadi salah satu pusat pengemblengan mental anti-penjajah. Misalnya, dengan dikeluarkannya fatwa haram *tashabbuh bi al-kuffār* (menyerupai kafir) untuk mengantisipasi agar umat Islam tidak bersimpati pada kaum penjajah yang non-muslim (kafir). Terlahir, tumbuh dewasa, dan puluhan tahun dididik di pondok

pengawasan kiai selaku pemimpin pesantren tertinggi atau santri senior yang ditunjuk sebagai *badal* (asisten) olehnya.

Sebagai pemimpin pesantren, kiai selain menjalankan fungsi manajerial (*idāriyah*) kepesantrenan, juga berperan sebagai orang tua yang dekat dan mengayomi anak-anaknya. Ia adalah simbol keulamaan, pemimpin spiritual, dan pewaris Nabi dalam mendakwahkan Islam. Keberkahan dinisbatkan padanya dan untuk memperoleh keberkahan tersebut seorang santri harus taat, patuh, dan bersikap *tawādu'* (hormat) kepada kiai. Tidak hanya itu, kiai juga memiliki peran sosial lainnya, yaitu sebagai makelar budaya (*cultural broker*) sekaligus agen perubahan sosial (*agent of social change*). Sebagai makelar budaya, kiai berperan aktif sebagai alat penyaring atas berbagai informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap baik dan berguna, serta membuang apa yang dianggap merusak. Sebagai agen perubahan sosial, kiai secara kreatif menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Menariknya perubahan dimaksud dilakukan tanpa merusak ikatan-ikatan sosial yang telah ada, melainkan justru memanfaatkan ikatan-ikatan itu sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkan dengan merujuk pada kaidah *al-muhāfaẓah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḏu bi al-jadīd al-aṣlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih baik).⁵⁶⁸

⁵⁶⁸ Abdurahman Wahid, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial? Sebuah Pengantar", dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andy Muarly (Jakarta: P3M, 1987), xvi-xvii.

4. Pergaulan Sosial yang Luas

Pada bab sebelumnya telah diuraikan riwayat hidup Kiai Wahab, mulai dari saat masih kecil, dewasa, tua, dan akhirnya wafat. Di sana digambarkan bahwa Kiai Wahab adalah pribadi yang kompleks. Ia bukan sekadar seorang kiai yang dulunya pernah berproses menjadi santri, melainkan juga seorang saudagar, pendekar, pemimpin organisasi, jurnalis, pengacara (prokol), diplomat, pejuang kemerdekaan, hingga menjadi politisi papan atas baik di era Orla ataupun Orba. Ini semua menandakan pergaulannya luas, tidak eksklusif hanya mau bergaul dengan sesama kultur pesantren, melainkan juga dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dari beragam ideologi, kultur, budaya, serta agama yang berbeda. Pergaulan sosial yang luas ini kemudian membuka wawasannya tentang banyak hal, mulai dari wawasan keislaman, wawasan pendidikan, wawasan ekonomi, wawasan politik dan kebangsaan, serta wawasan-wawasan lainnya sehingga dalam menyikapi sesuatu tidak mutlak-mutlakan, melainkan mempertimbangkan sesuatu itu dari berbagai aspeknya.

Sebagai kiai pesantren Kiai Wahab menerima pengaruh luas dari gurunya, baik saat belajar di pesantren di Jawa, ataupun saat mukim di Makah. Sikap inklusif Kiai Wahab, misalnya, menurut Mun'im sangat dipengaruhi oleh gurunya yang bernama Kiai Zainuddin, Mojosari, Nganjuk. Pada masanya, Kiai Zainuddin ini dikenal masyarakat sebagai seorang sufi dengan kemampuan spiritual tingkat tinggi. Sebagai pemimpin pesantren, ia tidak canggung memberi izin para santri untuk menggelar pentas seni setiap akhir tahun meskipun jenis seni yang ditampilkan tidak umum bagi kalangan pesantren kebanyakan, semisal seni

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang sebelumnya, riset ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Pemikiran fikih kebangsaan Kiai Wahab mencakup beberapa unsur penting. *Pertama*, meletakkan semangat cinta tanah air sebagai manifestasi keimanan (*ḥubb al-waṭan min al-īmān*). Implementasi cinta tanah air itu di antaranya diwujudkan dalam bentuk perjuangan merebut kemerdekaan serta menggalang persatuan nasional. *Kedua*, meletakkan politik sebagai medium (*al-wasīlah*) dan agama sebagai tujuan (*al-maqāṣid*). *Ketiga*, menerima Pancasila sebagai ideologi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia, dengan keyakinan bahwa Islam telah menjiwai dan menjadi bagian tak terpisahkan dengannya. *Keempat*, menempatkan budaya Nusantara sebagai identitas nasional dan jati diri bangsa. Masing-masing dari keempat unsur tersebut memiliki peran: cinta tanah air sebagai ruh kebangsaan, raganya adalah institusi politik bernama negara (NKRI), Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatunya, sedangkan budaya Nusantara sebagai identitas bersama yang membedakannya dari bangsa-bangsa lainnya. Semua unsur tersebut, selain memiliki dasar fikih yang kuat, juga diperlukan demi memelihara keselamatan dan keutuhan bangsa serta negara, supaya tercapai masyarakat yang adil dan makmur di bawah naungan rahmat dan rida Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua: Menurut Kiai Wahab kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Penjajahan ataupun perbudakan tidak sejalan dengan Islam. Terdapat empat macam kemerdekaan yang diperjuangkan Kiai Wahab. *Pertama*, kemerdekaan politik, dalam arti berupaya menghapus praktik kolonialisme (*al-ḥurriyah ‘an al-istibdādiyah*). *Kedua*, kemerdekaan ekonomi (*al-ḥurriyah al-iqtisādiyah*) melalui gerakan perkoperasian. *Ketiga*, kemerdekaan pendidikan (*al-ḥurriyah ‘an al-jahālah*) melalui upaya pemerataan akses pendidikan secara adil, murah, dan berkualitas. *Keempat*, kemerdekaan ideologis, dalam arti bahwa Indonesia selamat dan bebas dari pengaruh paham-paham ekstrem intoleran (*al-ḥurriyah ‘an al-taṭarruf wa al-afkār al-munḥarifah*) baik berbaju komunisme, wahabisme, atau lainnya. Memperjuangkan empat varian kemerdekaan di atas penting dilakukan dalam rangka mengamankan tujuan beragama dan bernegara (*ḥirāsāt al-dīn wa al-bilād*). Kemerdekaan di atas tidak mungkin diraih tanpa adanya persatuan. Menurut Kiai Wahab persatuan adalah senjata paling ampuh untuk menghapus penjajahan. Ada empat varian persatuan yang diperjuangkan Kiai Wahab, yaitu *ukhuwah nahḍiyah* (solidaritas sosial atas dasar ikatan ke-NU-an), *ukhuwah Islāmīyah* (solidaritas sosial atas dasar ikatan keislaman), *ukhuwah waṭaniyah* (solidaritas sosial atas dasar ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah insāniyah* (solidaritas sosial atas dasar kemanusiaan). Dalam menyatukan umat, Kiai Wahab sangat menekankan pentingnya dialog (musyawarah) di semua tingkatan, mulai skala lokal, nasional, hingga internasional yang rutin digelar secara periodik. Dengan dialog akan timbul sikap saling mengenal, memahami, dan menghargai, lalu dengan sendirinya timbul kebersamaan dan persatuan.

Ketiga: Dalam menjawab problem kebangsaan Kiai Wahab selalu merujuk pada karya-karya fikih mazhab Shafi'i. Sebab, sebagai *muqallid* berijtihad langsung dengan menggali hukum (*istinbāt*) dalam teks al-Qur'an dan hadis menurut keyakinannya tidak diperkenankan. Karya-karya fikih tersebut adalah *nuṣūṣ al-shar'i* (sumber hukum Islam) yang tak boleh ditinggalkan *muqallid*. Hanya saja dalam memahami dan menerapkannya dibutuhkan pembacaan kontekstual (*wāqī'iyah*), metodis (*manhaji*), sekaligus moderat (*wasāṭiyah*) melalui pelibatan *maqāṣid al-sharī'ah*, *uṣūl al-fiqh*, dan kaidah fikih, serta analisis sosial yang bertumpu pada lima prinsip. *Pertama*, memosisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kiblat hukum. *Kedua*, meletakkan teks fikih sesuai konteks dan *maqāṣid*-nya. *Ketiga*, membedakan strategi (*wasā'il*) dan tujuan (*maqāṣid*). *Keempat*, memutus perkara berdasarkan pertimbangan maslahat-mudarat yang paling dominan. *Kelima*, membuka ruang kritik atas keputusan hukum yang diambil demi mencapai kebenaran objektif. Inilah yang peneliti istilahkan dengan pendekatan sosio-*maqāṣid*, satu pendekatan fikih yang menyatukan tiga unsur: *maqāṣid al-sharī'ah*, teks, dan konteks.

Selanjutnya, aplikasi teori sosiologi pengetahuan sebagai pendekatan dalam riset ini menghasilkan temuan bahwa pemikiran kebangsaan Kiai Wahab dipengaruhi setidaknya oleh empat faktor, yaitu pesantren dengan tradisi keagamaan yang berwatak anti-kolonial, tradisi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang mengembangkan pola pikir moderat (*al-tawassuṭ*), adil (*al-i'tidāl*), berimbang (*al-tawāzun*), dan toleran (*al-tasāmuh*), penguasaan atas literatur fikih dan *uṣūl al-fiqh*, serta pergaulan sosial yang luas.

Nashr (LTN) NU atau Lakpesdam NU perlu membentuk tim khusus penyelamatan karya-karya Kiai Wahab. Selanjutnya karya-karya tersebut dikaji, dikembangkan, dan disebarluaskan agar gagasan-gagasan besar Kiai Wahab bermanfaat secara luas.

2. Kiai Wahab adalah pemikir besar yang telah mewariskan karya ilmiah dan amaliah bagi bangsa dan negara ini. Namun, karena keterbatasan studi maka riset ini belum mampu mengungkap semua sisi pemikiran Kiai Wahab. Pemikirannya tentang pengembangan pendidikan Islam, pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan (*leadership*), penguatan nasionalisme adalah beberapa isu yang memungkinkan untuk dieksplorasi lebih jauh dan mendalam oleh peneliti-peneliti berikutnya.
3. Keterbatasan waktu, dana, dan tenaga menyisakan banyak kekurangan pada riset disertasi ini. Oleh sebab itu, peneliti membuka ruang kritik, saran, dan masukan dari siapapun demi perbaikan dan penyempurnaan riset disertasi ini.

- Anṣārī (al), Zakariya. *al-Ghurar al-Bahiyah fī Sharḥ al-Bahjat al-Wardiyah*, Vol. 2. t.t.p.: al-Maṭba‘ah al-Maymanyah, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah As Philoshophy of Islamic Law*. London: The International of Islamic Thought, 2008.
- Akarhanaf. *Kiai Haṣjim Asj‘ari: Bapak Ummat Islam Indonesia*. Djombang: t.t.p., 1949.
- Adnan, A. Basit. *Kemelut di NU: antara Kyai dan Politisi*. Solo: CV Mayasari, 1982.
- Algar, Hamid. *Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, terj.Rudy Harisah Alam. Jakarta: Paramadina, 2008.
- ‘Asqalāni (al), Aḥmad bin Ali bin Ḥajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Atjeh, Aboebakar. *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Haṣjim*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- , *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. Solo: CV Ramadhani, Cet.IV, 1985.
- Abū al-Khair, ‘Abdullāh Marwā. *al-Mukhtaṣar min Kitāb Nashr al-Nūr wa al-Zuhr fī Tarājim Afāḍil Makah*. Jeddah: ‘Ālam al-Ma‘rifah, 1986.
- Artawijaya, “Debat Nadhlatoel Oelama (NO) dan Persatoean Islam (Persis) : Pendapat yang Bersilang, Hati yang Bertaut”, dalam <http://jejakislam.net/debat-nadhlatoel-oelama-no-dan-persatoean-islam-persis-pendapat-yang-bersilang-hati-yang-bertaut/> (Diakses 11 Februari 2019).
- Ash‘ari, Muḥammad Hāshim. *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmi, 1418 H.
- , “Muqaddimah al-Qānūn al-Asāsi li Jam‘iyah Nahdat al-‘Ulamā’”, dalam *Irshād al-Sāri fī Jamī‘i Muṣannafāt al-Shaikh Hāshim Ash‘ari*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmi, t.t.
- Azizi, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainifik-Modern*. Jakarta : Teraju, Cet. V, 2006.
- Azra, Azyumardi. “Memahami Konflik Barat-Islam dalam Era Global”, Kata Pengantar dalam Karel Steenbrink, *Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia: 1596-1942*, terj. Suryan A. Jamrah. Yogyakarta: Gading Publishing, 2017.

- Baghdādi (al), ‘Abd al-Qāhir. *al-Farq baina al-Firaq*. Kairo: Maktabah Ibn Sina, t.t.
- Bājūrī (al), Ibrāhim. *Ḥashiyah al-Bājūrī*, Vol. 4. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016.
- Barton, Greg. *Abdurahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. Sydney: A UNSW Press, 2002.
- Bayḍāwī (al), Naṣīr al-Dīn. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, Vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi, 1418 H.
- Berg, Van Den. “De Mohammedaansche Geestelijkheid en De Geestelijke Goederen op Java en Madoera”, terj. Paul W. van Der Veur. *Indonesia 84* (Oktober, 2007).
- Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Boston: A Pearson Education Company, 2001.
- Burhanudin, Jajat. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- , “The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading The Intellectual Journey of Snouck Hurgronje”, *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1 (2014).
- Batabyal, Anindya. “Separatism in The Archipelago: Is Indonesia Moving Closer to Disintegration?”, dalam *Jadavpur Journal of International Relations*, Vol. 7, Issue 1 (2003).
- Bin ‘Ashūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.
- , *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā‘i fī al-Islām*. Tunisia: Sharikah al-Tunisiyah, Cet. 2, t.t.
- , *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 16. Tunisia: al-Dār al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984.
- Bin Khaldūn, ‘Abd al-Raḥmān. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006.
- Bin Sa‘īd Bābaṣīl, Muḥammad bin Sālim. *Is ‘ādur Rafīq fī Sharḥ Matn Sullam al-Tawfīq fī Mahabbatillah ‘ala al-Taḥqīq*. t.tp.: al-Ḥaramayn, t.t.

- Bin ‘Abd al-Salām. ‘Izz al-Dīn. *al-Qawā'id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.
- '. ‘Izz al-Dīn. *Shajarat al-Ma‘ārif wa al-Aḥwāl wa Ṣāliḥ al-Aqwāl wa al-A‘mal*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Bin Abī Shaibah, Abū Bakr. *al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*, Vol. 4. Riyad: Maktabah al-Rush, 1409 H.
- Bin ‘Ashūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, Cet. 2, 2001.
- Bin Bayyah, ‘Abdallāh. *‘Alāqah Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Uṣūl al-Fiqh*. London: Muassah al-Furqān li al-Turāth al-Islāmiy, 2006.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2003.
- Būziyān, ‘Alyān. “Maqāṣid al-Aḥkām al-Sulṭāniyah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyah: Dirāsah Dustūriyah Maqāṣidiyah Muqāranah”, dalam http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12:12-9-2011 (23 Agustus 2017)
- Bodgan, Robert & Steven J. Taylor. *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Inggris : Edinburgh University Press, 1990.
- Daḥlān, Ahmad bin Zaini. *Fitnat al-Wahhābiyah*. Istanbul: Isik Kitabevi, 1978.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur*. t.p.: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977.
- Dillon, Michael R. *Wahhabism: Is it a Factor The Spread of Global Terrorism?* California: Tesis Master Naval Postgraduate School, 2009.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, Cet. 8, 2011.
- Dobbin, Christine . “Islamic Revivalism in Minangkabau at The Turn of Nineteenth Century”, *Modern Asian Studies*, Vol. 8, No. 3 (1974).

- Doeppers, Daniel F. "An Incident in The PRRI/Permesta Rebellion of 1958", *Indonesia*, No. 14 (Oktober, 1972).
- Effendy, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi & Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Esack, Farid. *al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas*, terj. Watung A. Budiman. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 2, 2010.
- Fādāni (al), Muḥammad Yāsin bin Muḥammad 'Isa. *al-'Iqd al-Farīd min Jawāhir al-Asānid*. Surabaya: Dār al-Saqqāf, Cet. 2, t.t.
- Falimbāny (al), Muḥammad Muhkhtār al-Dīn Zayn al-'Ābidīn. *Bulūgh al-Amāny fī al-Ta'rīf bi Shuyūkh wa Asānid Musnid al-'Aṣri al-Shaykh Muhammad Yāsin bin Muḥammad 'Isā al-Fādani*. Makkah: Dār Qutaibah, 1988.
- Feillard, Andree. *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LkiS, Cet. 3, 2009.
- Fealy, Greg dan Greg Barton (ed.). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LkiS, Cet. 3, 2010.
- Formichi, Chiara. *Islam and The Making of The Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2012.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, dkk. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Genggong, Anhar. "Ketika KH. Abdul Wahab Chasbullah Menjawab Tantangan Zaman", Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional Mengenang *Almaghfurlah* KH. Abdul Wahab Hasbullah. Tambakberas, Jombang, Rabu 3 September 2014.
- Gellner, Ernest. *Nation and Nationalism*. Inggris: Basil Blackwell, 1983.
- Ghazāli (al), Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.t.
- , *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2. Madinah: t.p., t.t.
- Given, Lisa M. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, entri "Content Analysis". California: SAGE Publications, 2008.

- Hamzah, Muchotob (*et.al*). *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Sidoarjo: Al Maktabah, Cet. IV, 2011.
- Haitami (al), Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Ali bin Ḥajar. *al-Fatāwā al-Ḥadithiyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hartono, “Kontribusi K.H. Wahab Hasbullah dalam Berorganisasi”. Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Harari (al), ‘Abdullah. *Ṣariḥ al-Bayān fī al-Radd ‘ala Man Khālaḥ al-Qur’an*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Mashāri‘ al-Khairiyah, t.t.
- . *Idzhār al-‘Aqīdah al-Sunniyah bi Sharḥ al-‘Aqīdah al-Ṭaḥāwīyah*. Beirut: Dār al-Mashāri‘ al-Khairiyah, 1997.
- . *al-Sharḥ al-Qawīm fī Ḥall Alfāz Ṣirāt al-Mustaqīm*. Beirut: Sharikah Dār al-Mashāri‘, 2013.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Halim, Abdul. *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab*. Bandung: Percetakan Baru, t.t.
- Hidayat, Asep Achyat & Setia Gumilar, “Friction in Masyumi: A Historical Studies on Internal Conflict Event of Islamic Party in Indonesia, 1945-1960”, dalam *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, No. 8, Vol. 1 (Oktober, 2016), 67.
- Hitti, Philip K. *The Makers of Arabs History*. New York : Harper Torchbooks, 1971.
- Hobsbawm, E.J. *Nation and Nationalism since 1780 : Progamme, Myth, Reality*. Inggris: Cambridge University Press, 1991.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andy Muarly. Jakarta: P3M, 1987.
- . “The Dar ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in The Historical Process”, *Indonesia*, No. 20 (Oktober, 1975).
- Ḥuṣni (al), Taqiy al-Dīn. *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥall Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Vol. 2. t.t.p.: al-Haramain, 2005.

- “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah> (19 Pebruari 2018)
- HS, Mastuki dan M. Ishom El-Saha (ed.). *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Idahram, Syaikh. *Sejarah Berdarah Sekte Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Cet. 20, 2012.
- ‘Id (al), Ibn Daqīq. *Sharḥ al-Arba‘in al-Nawawiyah fī al-Aḥādīth al-Nabawiyah*. Beirut: Sharikah Dar al-Mashārī‘, 2006.
- ‘Imārah, Muḥammad. *Mafhūm al-Ḥurriyah fī Madhāhib al-Islāmiyin*. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Duwaliyah, 2009.
- Ismail, Faisal. “The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to The Establishment of Indonesian State”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2011).
- Istanbūli (al), Ismā‘il Ḥaqqi bin Muṣṭafā. *Ruḥ al-Bayān*, Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jabbār (al), ‘Umar ‘Abd. *Siyar wa Tarājim Ba‘d ‘Ulamā’ina fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah*. Jeddah: Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa‘ūdiyyah, cet. 3, 1986.
- Jābiry (al), Muhammad ‘Abid. *Bunyah al-‘Aql al-‘Araby; Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nazm al-Ma‘rifah fī al-Thaqāfah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Araby, 1993.
- Jaghīm, Nu‘mān. *Madkhal ila al-Mazhab al-Shāfi‘i: Rijāluhu wa Uṣūluhu wa Kutubuhu wa Iṣṭilāḥātuḥu*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011.
- Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Ju Lan, Thung & M. Azzam Manan (ed.). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press, 2011.
- Juwaini (al), Abū al-Ma‘ālī. *Ghiyāth al-Umam fī Iltiyāth al-Zulm*. t.t.p.: Maktabah Imām al-Ḥaramain, 1401 H.
- Kamali, Muhammad Hashim. “Law and Society; The Interplay of Revelation and Reason in The Shariah”, dalam John L. Esposito (editor), *The Oxford History of Islam*. New York : Oxford Universiti Press, 1999.

- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Cet. 3, 2018.
- Karolewski, Ireneusz Pawel dan Andrzej Marcin Suszycki. *The Nation and Nationalism in Europa*. Edinburg University Press, 2011.
- Khalāf , ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Rashīd, 2008.
- Knaap, Gerrit. *Bijdragen tot de Taal , Land en Volkenkunde*, Vol. 154, No. 3 (1998).
- Kubaysi (al), Sa’d ‘Abd al-Raḥmān Faraj. *Maqāṣid al-Shari‘ah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2017.
- Kohn, Hans. *The Idea of Nationalism*. London: Routledge, 2017.
- Latief, M. Haṣjim. *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Waljamaah*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 1979.
- Lestari, Ani. “Pemikiran KH. Abdul Wahab Hasbullah tentang Dakwah Islamiyah”. Skripsi-- IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015.
- Lev, Daniel S. “Colonial Law and The Genesis of The Indonesian State”, *Indonesia*, No. 40 (Oktober, 1985)
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu*, Vol. 2, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Machfoedz, Maksoem. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat, 1982.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Manẓūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, Vol. 13. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Mansoor, M. *English-Arabic Dictionary of Political, Diplomatic, and Conference Terms*. New York: McGraw Hill Company, 1961.
- Maḥalliyy (al), Jalāl al-Dīn. *al-Badr al-Ṭālī‘ fī Ḥall Jam‘ al-Jawāmi‘*, Taḥqiq: Murtaḍā ‘Ali al-Daghīstāni. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005.
- Maḥalliyy (al), Shams al-Dīn bin Muḥammad bin Aḥmad. *Sharḥ al-Jalāl ‘ala Matn Jam‘ al-Jawāmi‘*, Vol 1. Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

- Malibāri (al), Zainuddin. *Fath al-Mu'īn bi Sharḥ Qurrat al-'Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*. t.t.p.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Mar'ashli (al). Yūsuf. *Nathr al-Jawāhir wa al-Durar fī 'Ulamā' al-Qarn al-Rābi' 'Ashar*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2006.
- Masfiah, Umi. "Pemikiran Pembaharuan KH. Abdul Wahab Chasbullah terhadap Lahirnya Nahdlatul Ulama", *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 18, No. 2 (2016).
- Masbuchin dan Mohammad Sufjan Cholil. *Nahdlatul Ulama di Tengah-Tengah Rakjat dan Bangsa Indonesia* Kebumen: Penerbit Daya Bhakti, 1967.
- Maskumambang, Muhammad Faqih. *al-Nusus al-Islamiyah fi al-Radd 'ala Madhhab al-Wahhabiyah*, disunting Abdul Aziz Masyhuri. Depok: Sahifa, 2015.
- Maykut, Pamela dan Richard Morehouse. *Beginning Qualitative Research: A Philoshopic and Practical Guide*. London: UK The Falmer Press, 1994.
- Masyhuri, A. Aziz. *99 Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa dan Hizib*. Bogor: Keira Publishing, 2017.
- Ma'shum, Saifullah (editor). *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Māwardi (al), Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1960.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Miṣri (al), Fathī al-Azhari. *Adillah wa Wathāiq Faḍāih al-Wahhābiyah*. t.tp.: t.p., 2015.
- Mizziy (al), Yūsuf bin 'Abd al-Raḥmān bin Yūsuf. *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980.
- Muhammad, Husen. "Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi", *Makalah*, disampaikan pada penganugerahan Doktor Kehormatan bidang Tafsir Gender di UIN Walisongo Semarang, 26 Maret 2019.
- Muhajir, Afifuddin. "Metode dan Penerapan Istibanth al-Ahkam dalam Menyelesaikan Problem Kontemporer", dalam <http://mahad->

- Qazwaini (al), Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2. t.t.p.: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiy, t.t.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramli, Muhammad Idrus. *Madzhab al-Asy’ari: Benarkah Ahlussunnah Wal-Jamaah? Jawaban terhadap Aliran Salafi*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Raysūniy (al), Ahmad. *Naẓariyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibiy*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- . *al-Fikr al-Maqāṣidy : Qawāiduhu wa Fawāiduh*. Rabat: al-Dār al-Bayḍā’, 1999.
- Renan, Ernst. “What is a Nation”,
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36772335/Renan1882EN-Nation.pdf?> (6 Januari 2020)
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satria Wahana, dkk. Jakarta: Serambi Ilmu, cet. 3, 2007.
- Rifai, Muhammad. *KH. Wahab Hasbullah: Biografi Singkat*. Yogyakarta: Garasi House of Book, Cet. 2, 2014.
- Roorda, T. *Kitab Toehpah: Ben Javaansch Handboek Voor Het Mohammedaansch Recht*. Leiden: E.J. Brill 1895.
- Sadewa, Ubaidilah. *KH. Abdul Wahab Chasbullah: dari Pesantren untuk Indonesia*. Tangerang: Lingkar Muda Nusantara, 2014.
- Salim, Arsykal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008.
- Said, Edward W. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Menundukkan Timur sebagai Subjek*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saleh, Abdul Mun’im. *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah sebagai Metode Hukum Islam*. Ponorogo: Nadi Pustaka, 2012.
- . *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Saqqāf (al), ‘Alawi bin Aḥmad. *Tarshih al-Mustafīdīn bi Taushīkh Fath al-Mu‘īn*. Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- Sayono, Joko. “Historiografi Pesantren: Perspektif Metodologis antara Ada dan Tiada”, *Makalah*, tidak diterbitkan.
- Schacht, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Joko Supomo. Yogyakarta : Insan Madani, 2010.
- Shohib, Abdussalam, dkk. *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*. Jombang: Yayasan Manbaul Ma’arif, Cet. 2, 2015.
- Shahrastāni (al). *al-Milal wa al-Niḥal*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Shāṭibi (al), Abū Ishāq. *al-I’tisām*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.
- , *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Sharī‘ah*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
- Shaṭā, Abū Bakr bin Muḥammad. *I‘ānat al-Ṭālibīn ‘ala Ḥall Alfādz Fath al-Mu‘īn*, Vol. 2 dan 3. t.t.p.: al-Haramain, t.t.
- Sha‘ībi (al), Aḥmad Qāid. *Wathīqat al-Madīnah: al-Maḍmūn wa al-Dilālāh*. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyah, 2006.
- Shohib, Abdussalam (et.al). *Kiai Bisri Syansuri: Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap*. Jombang: Yayasan Mambaul Maarif, Cet. 2, 2015.
- Sindi, Abdullah Muhammad. “Britain and Rise of Wahhabism and The House of Saud”, *Kana’an Bulletin*, Vol. IV, No. 361 (16 Januari 2004).
- Smith, Anthony D. *Nationalism and Modernism*. London: Routledge, 1998.
- , “The Origin of Nations”, *Ethnic and Racial Studies*, 1989.
- Suharno, S. *Sejarah Kelahiran dan Perjuangan Nahdlatul Ulama*. Purwokerto: t.p., 1981.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*, Vol. 1 dan 2. Bandung: Surya Dinasti, 2016.
- Suprayitna, Iis. “Pergulatan Politik KH. Abd. Wahab Hasbullah: Studi Analisa terhadap NU dan Negara”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- Soeprapto. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. t.t.: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara [LPPKB], 2010.

- Soebagijo. *K.H. Masjkur: Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Suyūṭi (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr. *Sharḥ al-Kawkab al-Sāṭi‘ Nazm Jam‘i al-Jawāmi‘*, Vol. 1. Kairo: Dār al-Salām, 2008.
- . *al-Ashbah wa al-Nadzāir fī Qawā‘id wa Furu‘ Fiqh al-Shāfi‘iyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- S. Soebardi. “Kartosuwiryo and The Darul Islam Rebellion in Indonesia”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 14, No. 1 (Maret, 1983).
- Steenbrink, Karel. *Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia: 1596-1942*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2017.
- Ṭabari (al), Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an*, Vol. 2 dan 10. t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Tim Sejarah Tambakberas. *Tambakberas: Menelisik Sejarah Memetik Uswah*. Jombang: Pustaka Bahrul Ulum, Cet.2, 2018.
- Tim Teknis. *Profil Kabupaten Jombang*. Jombang: Bappeda Kabupaten Jombang, 2014.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Bahtsul Masail. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*. Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- Tim PWNU Jawa Timur. *Aswaja An-Nahdliyyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, Cet. 3, 2009.
- Tim PW LTN NU Jatim. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M*. Surabaya: Khalista, Cet. 3, 2007.
- Treanor. “Structures of Nationalism”, *Sociological Research Online*, Vol. 2, No. 1, 1997.
- Tubāni (al), Abi al-Faḍal al-Senori. *Maḥmūd Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah min Kitāb al-Durr al-Farīd fī Sharḥ Jauharat al-Tauhid*. t.t.p.: t.p., t.t.

